

**PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI KINERJA KEPALA
DESA DI DESA BOTUBILOTAHU KECAMATAN MARISA
KABUPATEN POHuwATO**

Oleh

FERDI HUSAIN

NIM : S2118149

SKRIPSI



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI KINERJA KEPALA DESA DI DESA BOTUBILOTAHU KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHuwATO

Oleh

FERDI HUSAIN

NIM : S2118149

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar kesarjanaan
Gorontalo,.....2022

PEMBIMBING I



Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si
NIDN : 0904068201

PEMBIMBING II



Apriliani Parengring, S.IP.,M.AP
NIDN : 9909913839

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Darmawati Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924.0767.01

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI KINERJA KEPALA DESA DI DESA BOTUBILOTAHU KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHuwATO

Oleh

FERDI HUSAIN

NIM : S2118149

SKRIPSI

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di hadapan Komisi Penguji
Gorontalo.....2022

KOMISI PENGUJI

1. Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si
2. Aprilani Parengring, S.IP.,M.AP
3. Dr. Gretty Syatriani Saleh, S.IP.,M.Si
4. Dr.,Dra, Rusni Djafar, M.PA
5. Hasman Umuri, S.IP.,M.Si

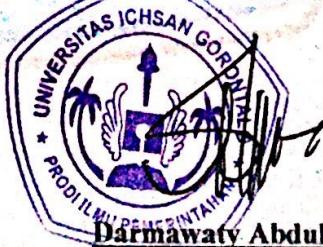
MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Arman, S.Sos.,M.Si
NIDN : 0913.0786.02

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Marisa,2022

Yang membuat Pernyataan



FERDI HUSAIN
NIM : S2118149

ABSTRACT

Ferdi Husain : S2118149 2022. Community Perception Regarding the Performance of the Village Head in Botubilotahu Village, Marisa District, Pohuwato Regency.

The purpose of this study was to find out how the perceptions and views of the community regarding the performance of the village head in the village of botubilotahu, sub-district of marisa, district of pohuwato. The method in this research is descriptive with a qualitative approach to make descriptive, descriptions or paintings in a systematic, factual and accurate way about facts, characteristics in relation to phenomenal relationships that are the focus of research.

The results showed that based on the results of research and findings in the field related to public perceptions of the performance of the village head of botubilotahu as measured through the quality dimension, it can be concluded that from the four questions in the indicator, the average perception of respondents was GOOD based on the calculation of the respondent's answer interval scale. Based on the results of research from the responses and perceptions of the community about the performance of the village head of botubilotahu which is presented through the frequency table above which is correlated with the findings of the researchers in the field, then overall that the quantity indicator, it can be concluded from the three questions in the indicator that the average perception is LESS GOOD from respondents based on the calculation of the respondent's answer interval scale. Based on the results of research from the responses and perceptions of the community about the performance of the village head of botubilotahu which is presented through the frequency table above which is correlated with the findings of the researchers in the field, relating to indicators of the implementation of the village head's duties, it can be concluded from the three questions in the indicator that the average perception is LESS GOOD of respondents based on the calculation of the respondent's answer interval scale. Based on the results of research from the responses and perceptions of the community about the performance of the village head of botubilotahu which is presented through the frequency table above which is correlated with the findings of researchers in the field, relating to the Responsibility indicator, it can be concluded from the three questions in the indicator that on average they get a GOOD perception from respondents based on calculation of the respondent's answer interval scale.

Keywords: Perception, Village Head Performance

ABSTRAK

Ferdi Husain : S2118149 2022. Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Kepala Desa di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah persepsi dan pandangan masyarakat mengenai kinerja kepala desa di desa botubilotahu kecamatan marisa kabupaten pohuwato. Metode dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk membuat dekriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat secara hubungan antar fenomenal yang menjadi fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang kinerja kepala desa botubilotahu yang di ukur melalui dimensi kualitas, dapat disimpulkan dari keempat pertanyaan dalam indikator tersebut rata-rata mendapatkan persepsi BAIK dari responden berdasarkan perhitungan skala interval jawaban responden. Berdasarkan hasil penelitian dari tanggapan dan persepsi masyarakat tentang kinerja kepala desa botubilotahu yang disajikan melalui tabel frekuensi tersebut diatas yang dikorelasikan dengan temuan peneliti dilapangan, maka secara keseluruhan bahwa indikator kuantitas, dapat disimpulkan dari ketiga pertanyaan dalam indikator tersebut rata-rata mendapatkan persepsi KURANG BAIK dari responden berdasarkan perhitungan skala interval jawaban responden. Berdasarkan hasil penelitian dari tanggapan dan persepsi masyarakat tentang kinerja kepala desa botubilotahu yang disajikan melalui tabel frekuensi tersebut diatas yang dikorelasikan dengan temuan peneliti dilapangan, berkaitan dengan indikator pelaksanaan tugas kepala desa, dapat disimpulkan dari ketiga pertanyaan dalam indikator tersebut rata-rata mendapatkan persepsi KURANG BAIK dari responden berdasarkan perhitungan skala interval jawaban responden. Berdasarkan hasil penelitian dari tanggapan dan persepsi masyarakat tentang kinerja kepala desa botubilotahu yang disajikan melalui tabel frekuensi tersebut diatas yang dikorelasikan dengan temuan peneliti dilapangan, berkaitan dengan indikator Tanggung Jawab, dapat disimpulkan dari ketiga pertanyaan dalam indikator tersebut rata-rata mendapatkan persepsi BAIK dari responden berdasarkan perhitungan skala interval jawaban responden.

Kata Kunci : Persepsi, Kinerja Kepala Desa

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Kegagalan bukan berarti kehancuran, tetapi sebagai batu loncatan menuju sukses”

(*Ferdi Husain*)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Allah SWT Ibuku, Bapakku, Kakakku, Adikku dan Sahabat-sahabatku, terima kasih atas semua yang kalian berikan padaku.

(FERDI HUSAIN)



ALMAMATERKU UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

TEMPAT AKU MENIMBA ILMU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah S.W.T serta salam dan taslim atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengantar kita semua dari alam kegelapan ke alam terang sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul "**Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Kepala Desa di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.**" Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Kepala Desa di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato .

Adapun Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menghadapi banyak hambatan karena kurangnya literature dan referensi dalam mendukung teori-teori, akan tetapi berkat petunjuk berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr.Dra.Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.

3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Darmawati Abdrazak, S.IP.,M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Iskandar Ibrahim dan Ibu Aprilani Parengring selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal penelitian ini.
6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Terisitimewa Kedua orang tua tercinta yang selama ini telah bersusah payah membesarkan saya, dan telah banyak membantu mendoakan kesusksesan saya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Gorontalo,..... 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO & PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. ManfaatPenelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Persepsi.....	8
2.2. Pengertian Masyarakat.....	12
2.3. Pengertian Kinerja	14
2.3.1. Indikator Kinerja	15
2.3.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja.....	16
2.3.3. Penilaian Kinerja	17
2.4. Pengertian Desa	18
2.5. Konsep Aparatur Desa	24
2.6. Otonomi Desa	27
2.7. Kerangka Pemikiran	32

BAB III OBJEK METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Waktu Penelitian	34
3.2. Desain Penelitian	34

3.3. Definisi Operasional Variabel	34
3.4. Populasi dan Sampel.....	35
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	36
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.1.1. Sejarah Singkat Désa Botubilotahu Kecamatan Marisa	39
4.1.2. Visi dan Misi Désa Botubilotahu	41
4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Désa Botubilotahu	42
4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.....	44
4.1.5. Karakteristik Responden	49
4.2. Hasil Penelitian Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Kepala Desa	53
4.2.1. Indikator Kualitas	54
4.2.2. Indikator Kuantitas	58
4.2.3. Indikator Pelaksanaan Tugas.....	62
4.2.4. Indikator Tanggung Jawab.....	66
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	70
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran-Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel .1 : Nama-nama Kepala Désa	40
Tabel 2 : Sejarah Pembangunan Désa.....	40
Tabel 3 : Struktur Pemerintah Désa.....	42
Tabel 4 : Karakteristik Responden Menurut Umur	49
Tabel 5 : Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin	50
Tabel 6 : Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan	51
Tabel 7 : Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan	52
Tabel 8 : Kepala Desa Botubilotahu Memiliki Kualitas	54
Tabel 9 : Kepala Desa Botubilotahu Pernah Melakukan Kesalahan	55
Tabel 10 : Kepala Desa Botubilotahu Menjalankan Kepemimpinannya	56
Tabel 11 : Kepala Desa Botubilotahu Dalam Kepemimpinanya.....	57
Tabel 12 : Kepala Desa Botubilotahu Periode Kepemimpinanya	59
Tabel 13 : Pencapaian Kinerja Kepala Desa Botubilotahu	60
Tabel 14 : Kepala Desa Botubilotahu Mampu Menyelesaikan Semua	61
Tabel 15 : Kepala Desa Botubilotahu Memahami Tugas-Tugas.....	63
Tabel 16 : Kepala Desa Botubilotahu Mampu Menyelesaikan Permasalahan	64
Tabel 17 : Kepala Desa Botubilotahu Mampu Setiap Permasalahan	65
Tabel 18 : Kepala Desa Botubilotahu Memiliki Tanggung Jawab.....	67
Tabel 19 : Kepala Desa Botubilotahu Selalu Memperbaikinya	68
Tabel 20 : Kepala Desa Botubilotahu Bersedia Mengambil Resiko	69

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Kuisioner
2. Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian
3. Lampiran 3 : Rekomendasi Penelitian
4. Lampiran 4 : Surat Rekom Bebas Plagiasi
5. Lampiran 5 : Similarity Hasil Turniting
6. Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bentuk kesatuan masyarakat yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit kecil pemerintahan dalam pemerintahan Indonesia, melainkan lebih dari itu desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang telah ada, lama sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Terlepas dari bentuk dan berbagai sebutan bagi desa, dalam pelaksanaan semangat reformasi dan penegakan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan di daerah menyangkut pula dengan pemerintahan desa.

Kemajuan dan pertumbuhan masyarakat yang cepat serta hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang berdifikat dinamis dan dengan adanya birokrasi pemerintah, hal ini menuntut aparat pemerintah yang bertugas pada level bawah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat peka dan responsive membaca denyut nadi publik yang awajib dilayani (Wasistiono, 2002 ; 27). Kepala desa selaku aparatur harus selalu mampu secara mandiri dan juga secara organisasi untuk selalu meningkatkan profesionalisme yang berhubungan dengan tugas, serta tanggungjawabnya. Pada tingkatan inilah citra pemerintah desa dinilai oleh masyarakat.

Pelayanan prima dan berkualitas akan menciptakan kepuasan, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat. Hal ini juga tergolong ukuran tingkat kinerja birokrasi pemerintahan. Isu peningkatan kualitas pelayanan (*public service*) menjadi isu

penting dalam era pembangunan saat ini. Pelayanan publik menjadi isu utama yang menentukan keberhasilan setiap lembaga dalam memberikan pelayanan.

Thoha (2006 : 114) menjelaskan bahwa pelayanan public merupakan salah satu parameter untuk menilai kualitas administrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Baik buruknya administrasi public dapat dilihat dari seberapa baik pelayanan public, apakah sudah sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pemerintah desa memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yaitu mengatur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan desa. sebagai contoh pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan melakukan kerja sama antara desa, urusan pembangunan antara lain, melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana umum desa seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pasar desa. Urusan kemasyarakatan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dengan cara melakukan pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Dalam rangka untuk mengembangkan organisasi pemerintah desa maka salah satu hal yang harus dilakukan oleh kepala desa sebagai pemimpin di desa adalah mengarahkan atau memberikan motivasi terhadap aparatur pemerintah desa supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pengembangan organisasi pemerintah desa sangat diharapkan. Selain itu, hal ini tidak terlepas pula dari tanggung jawab kepala desa sebagai Pembina masyarakat demi terwujudnya pemerintah desa yang baik.

Pemerintah desa berkewajiban menyediakan infrastruktur sosial yang memadai, seperti lingkungan yang layak, meningkatkan keterampilan warga, tersedianya fasilitas umum yang memadai, dan tercukupinya sarana transportasi. Penyediaan infrastruktur sosial tersebut harus dilakukan supaya desa dapat berkembang dan mampu menjalankan rumah tangganya sendiri untuk mencapai kehidupan masyarakat yang makmur, sejahtera dan damai. Maka strategi dan program pemerintahan desa harus dapat memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan turut pula menikmati hasil kerja mereka sendiri. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan dan kebijakan yang ada perlu dituangkan dalam yang lebih sederhana, serta dengan biaya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

Banyak teori menjelaskan bahwa kesadaran dan juga partisipasi masyarakat desa merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial, terutama dalam rangka meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan sangat tergantung pada kemampuan kepala desa selaku pemimpin di desa. Sebab pada tingkatan yang paling bawah, kepala desa selaku pimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak untuk pelaksanaan pembangunan di desa sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat desa untuk mau berperan serta dalam membangun desa. sebagai pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki beban tugas yang tidak dapat dianggap ringan. Para aparatur desa sebagian besar tidak pernah mendapatkan pelatihan *public service* seperti para eksekutif di sebuah perusahaan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa menjalankan tiga fungsi utama, yaitu :

1. Sebagai kepanjangan tangan birokrasi pemerintah dengan menyediakan pelayanan administrasi untuk masyarakat desa.
2. Fungsi sosial yang bercampur aduk dengan fungsi pribadi, yaitu beranjangsana dengan warga masyarakat melalui silaturahim. Anjangsana sosial adalah kearifan lokal yang mempunyai makna simbolik, mendekatkan pamong desa dengan rakyatnya.
3. Fungsi pembangunan seperti menggerakkan perencanaan dari bawah, mengalokasikan bantuan ke masyarakat serta memobilisasi dana dan tenaga masyarakat melalui gotong royong.

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, pemerintah terus melakukan pembaharuan dibidang pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi terarah dan mempunyai dasar serta kepastian hukum, supaya dapat meletakan dasar-dasar administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga aparat pemerintah desa bisa menunjang program pemerintah untuk menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan professional.

Desa botubilotahu adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan marisa. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa di desa botubilotahu dilaksanakan oleh aparat desa yang berjumlah 12 orang yang terdiri atas seorang kepala desa dan beberapa perangkat desa. penyelenggaraan pemerintah desa akan berjalan baik dan terarah bahkan menjadi maju apabila kinerja kepala desa sebagai pemimpin di desa dapat mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada aparatnya sehingga dapat memberikan pelayanan tidak berbelit-belit dan tidak terlalu formal yang mengakibatkan masyarakat merasa kepentingannya terlayani dengan baik dan

bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa di desa botubilotahu perlu mengacu pada peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Sehingga kepala desa sebagai aparatur desa di harapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan observasi dan pengamatan penulis di desa botubilotahu terdapat beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh lemahnya kinerja kepala desa botubilotahu yang telah menjabat kurang lebih 2 (dua) periode dalam meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun ditingkatkan aparatur desa botubilotahu. Banyak permasalahan yang timbul disebabkan pula oleh perilaku kepala desa berlaku sewenang-wenang dalam kepemimpinannya serta terdapat kasus yang menyeret kepala desa sehingga berakibat pada penonaktifan kepala desa botubilotahu dari jabatannya selama kurang lebih 3 bulan oleh pemerintah daerah atas permintaan masyarakat dan BPD Desa Botubilotahu, namun saat ini sudah diaktifkan kembali. Penonaktifan jabatan kepala desa tersebut berdampak pada pelayanan pemerintah desa yang tidak maksimal dan tidak efektif.

Berkaitan dengan informasi tersebut, tentunya menimbulkan berbagai macam persepsi masyarakat terhadap kinerja kepala desa botubilotahu dalam memimpin desa, permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh lemahnya kinerja kepala desa tersebut dapat penulis identifikasi sebagai berikut :

1. Pelayanan pemerintah desa botubilotahu menjadi lamban, birokrasi yang tidak jelas dan berbelit-belit.

2. Ketidakjelasan dalam pembangian tugas diakibatkan oleh penunjukan aparat yang asal ada tanpa mempertimbangkan faktor pendidikan, kompetensi, dan kemampuan kerja.
3. Pemerintah desa masih bersifat pasif hanya menunggu tanpa ada usaha-usaha dalam menggali potensi yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa.
4. Setelah diaktifkan kembali, kepala desa masih terlihat kadang-kadang masih berkantor dirumah kediamannya sehingga memperlambat pelayanan
5. Kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat
6. Persoalan administrasi yang masih belum tertib dan setumpuk permasalahan lainnya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti sejauhmana persepsi dan pandangan masyarakat desa botubilotahu terhadap kinerja kepala desa dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Kepala Desa di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah persepsi dan pandangan masyarakat mengenai kinerja kepala desa di desa botubilotahu kecamatan marisa kabupaten pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah persepsi dan pandangan masyarakat mengenai kinerja kepala desa di desa botubilotahu kecamatan marisa kabupaten pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan wawasan keilmuan khususnya berkaitan dengan kinerka kepala desa.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa berkaitan dengan peningkatan kinerja kepala desa dan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Persepsi

Dilihat dari segi umumnya persepsi adalah pandangan atau pengamatan terhadap suatu objek yang telah diamati oleh seseorang yang berdasarkan latar belakang, pengalaman, dan sikap yang berguna untuk menafsirkan informasi yang meliputi sinyal sistem dalam saraf yang merupakan hasil dari stimulasi organ pengindra.

Seperti pendapat Miftah Thoha (2007:141): Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami bahwa persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukanya suatu tatanan yang benar terhadap situasi.

Selanjutnya persepsi juga merupakan fenoma seseorang atas apa yang dilihat dan dirasakan. Seperti yang dikemukakan Widyatun (2009:112) yaitu Persepsi atau tanggapan adalah proses mental yang terjadi pada diri manusia yang akan menunjukkan bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan, memberi, serta meraba (kerja indra) disekitar kita.

Sedangkan persepsi menurut Jalaluddin (2005:51) ialah pengalaman tentang sebuah objek, peristiwa, atau bahkan hubungan yang didapatkan dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Selanjutnya pengertian persepsi dikemukakan oleh Robbins (2003:97) yang menguraikan bahwa persepsi

merupakan kesan yang diperoleh oleh seseorang melalui panca indera kemudian dianalisa, dan diinterpretasi yang kemudian dilakukan evaluasi sehingga individu tersebut mendapatkan makna. Pendapat Robbins tersebut melengkapi pendapat sebelumnya, yaitu adanya unsur-unsur evaluasi atau penilaian terhadap obyek persepsi. Pengertian Persepsi menurut Walgito dan Robbins di atas tidak saling bertentangan. Dari kedua sumber tersebut terdapat kesamaan, yaitu :

1. Persepsi merupakan sebuah ataupun gambaran suatu obyek di luar diri individu itu sendiri.
2. Proses terjadinya persepsi dimulai melalui indra.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan cara pandang yang muncul dari kesadaran seseorang terhadap sesuatu isu yang terjadi. Persepsi dapat dijadikan penambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas. Persepsi memiliki ciri-ciri antara lain: seseorang yang memiliki persepsi yang tinggi akan berpikir luas dan tidak membeda-bedakan sesuatu, jadi tidak memandang masalah dari pandangan sempit, seseorang yang memiliki persepsi yang tinggi akan dengan mudah dapat berinteraksi dengan orang lain secara harmonis, dan mampu bersaing atau berkompetensi dengan sehat.

Menurut Walgito (2010:99) Setiap orang yang akan melakukan persepsi harus memenuhi beberapa syarat :

1. Perhatian

Biasanya seseorang tidak akan menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitarnya sekaligus,tetapi akan memfokuskan perhatiannya pada suatu atau dua objek. Perbedaan fokus akan menyebabkan perbedaan persepsi.

2. Set

Harapan seseorang akan rangsangan yang timbul, misalnya seseorang pelari akan melakukan start terhadap set akan terdengar bunyi pistol, dan di saat itu ia harus mulai berlari.

3. Kebutuhan

Kebutuhan sesaat maupun menetap kepada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.

4. Sistem Nilai

Sistem yang berlaku pada suatu masyarakat juga berpengaruh pada persepsi.

5. Ciri Kepribadian

Misalnya a dan b bekerja disebuah kantor, si a seseorang yang penakut akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan, sedangkan si b yang penuh percaya diri menganggap atasannya sebagai orang yang bisa diajak bergaul seperti orang yang lain.

6. Gangguan kejiwaan

Hal ini akan menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut dengan halusinasi.

Berdasarkan dengan diketahuinya syarat-syarat yang mempengaruhi persepsi seseorang, sangat ditentukan dari kepribadian, keadaan jiwa, dan harapan dalam melakukan persepsi. Persepsi yang positif mengakibatkan motivasi yang

tepat bagi seseorang sedangkan persepsi negatif mengakibatkan motivasi seseorang berkurang atau tidak baik.

David Krech dan Richard.S dalam Djalaludin Rahmat (2009:59) menjelaskan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu :

1. Faktor Fungsional

Faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal lain yang termasuk dalam faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis stimulan tapi karakteristik seseorang yang memberikan respon pada stimulan itu, faktor ini terdiri atas :

- a. Kebutuhan, kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada seseorang akan mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang, dengan demikian perbedaan kebutuhan akan menimbulkan perbedaan persepsi.
- b. Kesiapan mental
- c. Suasana Emosi seperti pada saat senang, sedih, gelisah, marah akan mempengaruhi persepsi.

2. Latar Belakang Budaya

Faktor Struktural Faktor ini berasal dari sifat stimulasi fisik dan sistem saraf individu, yang meliputi :

- a. Kemampuan berpikir
- b. Daya tangkap duniawi
- c. Saluran Daya Tangkap yang ada pada manusia.

Berdasarkan Faktor-faktor di atas maka penulis menyimpulkan pada umumnya persepsi merupakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu cara

belajar, latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman masa lalu, latar belakang dimana tersebut berada sehingga akan menghasilkan persepsi yang bermacam-macam seperti setuju, netral tidak setuju terhadap suatu objek yang diteliti.

2.2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling ketergantungan membentuk sebuah sistem dimana mereka saling berinteraksi antar individu-individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Masyarakat juga disebut sekelompok orang yang membentuk sistem semi tertutup atau semi terbuka dimana masyarakat juga sering disebut komunitas yang saling ketergantungan satu sama lain dan di dalam masyarakat pengorganisasinya berdasarkan mata percaharian.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Abdul sani (2007:30) yaitu Kata masyarakat berasal dari musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya, berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Menurut Auguste Comte dalam Abdul sani (2007:31) “Masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama disuatu wilayah tertentu dalam waktu yang cukup lama yang saling berhubungan berinteraksi satu sama lain atau bisa juga diakatakan sebagai kelompok orang yang membentuk suatu sistem yang tertutup

dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut serta dapat diartikan sebagai sekumpulan orang terdiri dari berbagai kalangan yang mampu dan tidak mampu yang tinggal dalam suatu wilayah yang memiliki hukum adat dan peraturan.

Pengertian masyarakat mewujudkan adanya syarat-syarat sehingga disebut dengan masyarakat, yakni adanya pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama dan adanya kerja sama diantara anggota kelompok memiliki pikiran atau perasaan menjadi bagian dari satu kesatuan kelompoknya. Pengalaman hidup bersama ini menimbulkan kerja sama, adaptasi terhadap organisasi dan pola tingkah laku anggota.

Menurut Soerjono Soekanto (2009:22) masyarakat mempunyai ciri pokok yaitu :

1. Manusia yang hidup bersama
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem yang hidup yang sama

Menurut Abu Ahmadi dalam Abdul Sani (2007:32) menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
2. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah tertentu.
3. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk kepentingan dan tujuan yang sama.

Berdasarkan pernyataan diatas disimpulkan bahwa ciri-ciri dan syarat masyarakat bukan hanya sekumpulan manusia saja tetapi manusia sebagai individu yang senang untuk berkumpul dan menjalani kehidupan dengan orang lain di suatu kawasan yang ia anggap sesuai dengan dirinya. Dan masyarakat dapat berkembang di lingkungan sosial membentuk sebuah tatanan kehidupan dan kebudayaan yang secara langsung dapat mempengaruhi tingkah laku individu di dalamnya untuk menyesuaikan keadaan dirinya dengan mayoritas orang lain di dalam masyarakat tersebut. Namun, masyarakat yang tinggal bersama dan saling ketergantungan harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan bersama.

Pengertian persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam memberikan kesimpulan dalam suatu obyek berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun obyeknya sama.

2.3. Pengertian Kinerja

Pengertian Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti pendapat yang dikemukakan Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Menurut Sedarmayanti (2011:260) mengungkapkan bahwa: Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil

kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkret dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

2.3.1. Indikator Kinerja

Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) mengemukakan bahwa indikator kinerja, yaitu :

1. Kualitas

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.

2. Kuantitas

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.

3. Pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.

2.3.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Tinggi rendahnya kinerja seorang pegawai tentunya ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) menyatakan bahwa Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Sedangkan menurut Keith Davis dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) dirumuskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah :

1. *Human Performance = Ability + Motivation*
2. *Motivation = Attitude + Situation*
3. *Ability = Knowledge + Skill*

a. Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan (*Ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (*knowledge + Skill*). Artinya, pegawai yang memiliki IQ rata-rata (IQ 110 – 120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (*the right man on the right place, the right man on the right job*).

b. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi

mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik (sikap secara mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai serta mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja.

Menurut A. Dale Timple yang dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2009:15) faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja dapat bersumber dari dalam individu pegawai maupun dari luar individu. Tinggal bagaimana kebijakan organisasi mampu menyelaraskan antara faktor-faktor tersebut.

2.3.3. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan faktor kunci dalam mengembangkan potensi pegawai secara efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Seperti yang dikemukakan Sedarmayanti (2011:261) “Penilaian kinerja adalah sistem formal untuk memeriksa/mengkaji dan mengevaluasi secara berkala kinerja seseorang”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja pegawai sangat perlu dilakukan, karena dapat dijadikan sebagai evaluasi kepala desa untuk proses tindak lanjut setelah mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari kinerja aparatur desa maka kepala desa dapat mengetahui tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi kekurangan serta mempertahankan kelebihan tersebut, sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan yang strategis mengenai hasil evaluasi kinerja serta komunikasi yang telah dilakukan oleh atasan dan bawahan sehingga tujuan instansi akan cepat tercapai.

2.4. Pengertian Desa

Kata “Desa” berasal dari bahasa India yakni *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.(Soetardjo, 1984 dalam Wasistiono, 2006; 7).

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Seperti yang dikemukakan Widjaja (2002:19) :

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, mengamanatkan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukimnya penduduk dengan peradaban yang terbelakang daripada kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya di sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebut, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilaayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dialami dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Widjaja,2003 19).

Desa selain merupakan konsep yang bisa berlaku umum, juga dalam realitasnya ada sekian perbedaan-perdaan (karakteristik) yang meliputinya, sehingga dengan karakteristik yang berbeda tersebut muuncullah konsep desa secara khusus (desadesadi indonesia). Perbedan desa di indonesia bukan hanya ketika dihadapkan dengan realitas desa di negara lain, bahkan di dalam negara Indonesia sendiri perbedaan-perbedaan itu terlihat jelas dan mencirikan karakteristiknya masing-masing.

Asli-tidaknya desa-desa di Jawa tidak terlepas dari kepentingan desa-desa pada zaman kolonial.Bermula dari penemuan desa-desa di sepanjang pantai utara P. Jawa oleh Herman Warner Muntinghe, maka desa-desa tersebut menjadi penting sekali artinya.Dalam kaitannya dengan ini, Sutardjo Kartohadikoesoemo berpendapat bahwa desa-desa tersebut adalah asli, karena di daerah-daerah seberang (bukan hanya luar Jawa tapi juga Pilipina) yang tidak terkena pengaruh Hindu pun juga terdapat daerahdaerahhukum semacam desa-desa tersebut (Sutardjo Kartohadikoesoemo, 1953).Desa sebagai kesatuan hukum (adat) dan kesatuan. Desa dan kelurahan memiliki beberapa perbedaan yang disebutkan dalam UU nomer 5 tahun 1979 yaitu:

- Bahwa desa adalah wilayah yang ditempati oleh penduduk yang masih merupakan masyarakat hukum, sedangkan kelurahan tidaklah demikian.
- Desa berhak mengurus Rumah tangganya sendiri sedangkan keluraha tidak.

Hal ini termanifestasi dalam prosedural pemilihan kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa setempat sebagai perwujudan sistem demokrasi Indonesia, berbeda dengan kelurahan yang dipilih atau tentukan oleh Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan Kota-kota lainnya. Data menunjukkan bahwa jumlah desa selalu bertambah dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena perkembangan ataupun kebijakan tertentu oleh pemerintah, munculnya desa-desa baru juga disebabkan Unit-unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

Dengan alasan tersebut jumlah desa diperkirakan masih akan terus bertambah yakni selama masih ada daerah-daerah yang belum berkembang dan masih sedikit jumlah penduduknya. Memang dalam desa tidak ada standarisasi yang baku, sebab desa yang sangat beranekaragam mulai dari tingkat kepadatan penduduk, luas wilayah, jenis pertanian, topografi, dst. Desa-desa di Indonesia tidak hanya desa pertanian saja, disamping desa pertanian juga terdapat jenis, jenis desa lainnya.

Saragi (1987: 120), walaupun sudah mempunyai rentan waktu yang lumayan salam sampai saat ini, namun mungkin masih relevan untuk digunakan sebagai landasan klasifikasi desa, misalnya menyebutkan beberapa jenis desa yang ada di Indonesia sebagai berikut:

- Desa tambangan (kegiatan penyebrangan orang atau barang,biasanya terdapat sungai-sungai besar)
- Desa nelayan (dimana mata pencaharian warganya dengan usaha perikanan laut).

- Desa pelabuhan (hubungan dengan mancanegara, antar pulau, pertahanan/strategi perang dsb.)
- Desa perdikan (desa yang dibebaskan dari pungutan pajak karena diwajibkan memelihara sebuah makam raja-raja atau karena jasa-jasanya terhadap raja).
- Desa penghasil usaha pertanian, kegiatan perdagangan, industri/kerajinan, pertambangan dan sebagainya.
- Desa-desa perintis (yang terjadi karena kegiatan transmigrasi).
- Desa pariwisata (adanya objek pariwisata berupa peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, keindahan alam dan sebagainya).

Selain desa yang identik dengan pertanian, ada juga desa nelayan yang juga menjadi penting untuk objek kajian desa. Selain Indonesia merupakan negara kepulauan dan maritim, pun akhirnya dampak itu dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, masyarakat yang tinggal di pesisir mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, hal ini relevan dengan definisi desa nelayan seperti disebut diatas bahwa desa nelayan adalah desa yang mata pencaharian penduduknya mencari ikan (di laut).

Di daerah pesisir juga terdiri dari daratan yang memungkinkan untuk juga dapat melakukan cocok tanam (bertani), akhirnya ada perpaduan masyarakat nelayan selain mencari ikan sebagai mata pencaharian utama juga bertani dan berkebun. Biasanya masyarakat nelayan identik dengan kemiskinan, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: tantangan alam yang cukup berat, termasuk faktor musim yang secara tiba-tiba dapat menghentikan usaha penangkapan ikan di laut. Selain itu juga masyarakat nelayan yang jumlah kepadatannya tinggi dalam

suatu wilayah (desa), namun dengan mata pencaharian yang sama (homogen) cenderung membuat pendapata perkapita mereka relative

Hal lain adalah keterbatasan penguasaan modal perikanan (perahu dan alat tangkap), keterbatasan modal dalam usaha perikanan (uang), keadaan perumahan dan pemukiman yang kurang memadai, kemampuan yang rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok pribadi (Maskun:1994:34).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukimnya penduduk dengan peradaban yang terbelakang daripada kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya di sektor pertanian.Bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilaayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyaarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dialami dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada dinegeri ini luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga, mayoritas penduduknya bekerja dibidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar masyarakatnya terjalin kuat. Para masyarakat nya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

2.5. Konsep Aparatur Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga dan rukun warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa aparatur desa antara lain :

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

a. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa yang diatur dalam pasal 14 yaitu Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam pasal 14 ayat (1) ini terlihat jelas kepala desa wajib menyelenggarakan pemerintahan desa, urusan pemerintahan dibantu oleh staf nya yang di dalamnya terdapat urusan pelayanan. Urusan pembangunan yaitu

pembangunan sarana dan prasarana desa dan urusan kemasyarakatan yaitu gotong royong bersama masyarakat.

- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang :
 - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d) Menetapkan Peraturan Desa
 - e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f) Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Kepala Desa dibantu oleh perangkat-perangkat desa lainnya baik dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.

2. Sekertaris Desa

Sekretaris desa merupakan ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya membantu Kepala Desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat desa serta membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa. Kepala Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa, apabila Kepala Desa berhalangan maka sekertaris desa yang menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sehari-hari.

Berdasarkan pertimbangan bahwa sekertaris desa sebagai kepala sekretariat adalah lebih banyak mengetahui urusan-urusan pemerintahan desa dibandingkan dengan perangkat desa lainnya, maka dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugasnya, sekertaris desa ditetapkan untuk mewakili kepala desanya dalam menjalankan tugasnya. Kepala-kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah tingkat II atas usul Kepala Desa. Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian sekertaris desa dan Kepala-kepala urusan diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

3. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan menteri-menteri. Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas Perangkat Desa; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas.

4. Kepala Dusun

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dalam desa dibentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala dusun adalah orang yang mengetua sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa atau unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan

wilayah kerja tertentu. Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati kepada daerah tingkat II atas usul kepala desa. Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari beberapa RT dan RW. Masa jabatan seorang kadus paling lama adalah sekitar lima tahun, mengikuti sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini.

5. Rukun Tetangga (RT)

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan.

6. Rukun Warga (RW)

Rukun Warga (RW) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.

2.6. Otonomi Desa

Menurut Paramitha dkk (Vol. 1, No. 4, Hal 91) Otonomi adalah istilah asing yang paling dekat pengertian kepada swatantra, mungkin tidak sinonim, tetapi seperti yang telah diterapkan hakikatnya adalah sama. Perlu ditambahkan bahwa di samping pembatasan pengaturan rumah tangga sendiri, desa dibebani tugas-tugas baru. Otonomi telah melahirkan antuisme yang luar biasa di tingkat desa, bukan berarti tidak ada persoalan yang serius berasal dari internal desa.

Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Desa menjelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Nurcholis (2011:20) isi Otonomi Desa mencakup :

- a. Pertahanan dari ancaman binatang buas/atau gangguan dari daerah luar;
- b. Keamanan dan ketertiban/polisional;
- c. Peradilan;
- d. Pekerjaan umum;
- e. Upacara keagamaan; dan
- f. Pertanian, perikanan, peternakan, perhutanan.

Sebagai masyarakat hukum adat yang dimiliki otonomi maka desa merupakan subyek hukum. Ndraha (1991:7) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya;
- b. Menjalankan pemerintah desa;
- c. Memilih kepala desa;
- d. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri;
- e. Memiliki tanah sendiri;
- f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;
- g. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa);
- h. Menyelenggarakan gotong-royong;

- i. Menyelenggarakan peradilan desa;
- j. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam menyelenggarakan Otonomi Desa yang bertanggung jawab perlu diadakan perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian Otonomi Desa, berupa pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik dengan mengolah sumber daya yang ada didesa.

Pelaksanaan otonomi desa menimbulkan berbagai harapan baik bagi masyarakat, swasta bahkan pemerintah sendiri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa, terutama Kabupaten dan atau Kota dalam menjalankan kebijakan otonominya. Disinilah perlunya mengidentifikasi berbagai dimensi/faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi desa.

Otonomi desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan termasuk fungsi-fungsi obyektif masyarakat. Ndraha (2003:442-445) mengungkap fungsi-fungsi obyektif masyarakat sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai sumber daya (subkultur ekonomi) seperti:
 - a. membeli semurah mungkin
 - b. menjual seuntung mungkin
 - c. membuat sehemat mungkin
2. Penciptaan keadilan dan kedamaian (subkultur pemerintahan) seperti :
 - a. berkuasa semudah mungkin

- b. menggunakan kekuasaan seefektif mungkin
 - c. mempertanggung jawabkan penggunaan kekuasaan seformal mungkin
3. Kontrol terhadap kekuasaan.

Tugas utama pemerintah dalam rangka Otonomi Desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa. Untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya.

Selanjutnya Kaloh (2003:72) menegaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi desa ialah manusia sebagai pelaksana yang baik. Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintah baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Selanjutnya, faktor yang kedua ialah kemampuan keuangan desa yang dapat mendukung pemberian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mamesah (2002:23) yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam Negara

tersebut. Sebaliknya kalau kondisi keuangan negara buruk, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

Faktor ketiga ialah anggaran, sebagai alat utama pada pengendalian keuangan desa, sehingga rencana anggaran yang dihadapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus tepat dalam bentuk dan susunannya. Anggaran berisi rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana, karena itu untuk menciptakan pemerintah desa yang baik untuk melaksanakan otonomi desa, maka mutlak diperlukan anggaran yang baik pula.

Faktor peralatan yang cukup memadai, yaitu setiap alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah desa. Peralatan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya, seperti alat-alat kantor transportasi, alat komunikasi dan lain-lain. Namun demikian, peralatan yang memadai tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki daerah, serta kecakapan dari aparat yang menggunakannya.

Faktor organisasi dan manajemen baik, yaitu organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Manajemen merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Mengenai arti penting dari manajemen terhadap penciptaan suatu pemerintahan yang baik,

Mamesah (2002:32) mengatakan dari pimpinan desa yang bersangkutan, khususnya tergantung dari pimpinan desa yang bersangkutan, khususnya tergantung kepada Kepala Desa yang bertindak sebagai Manajer Desa.

2.7. Kerangka Pemikiran

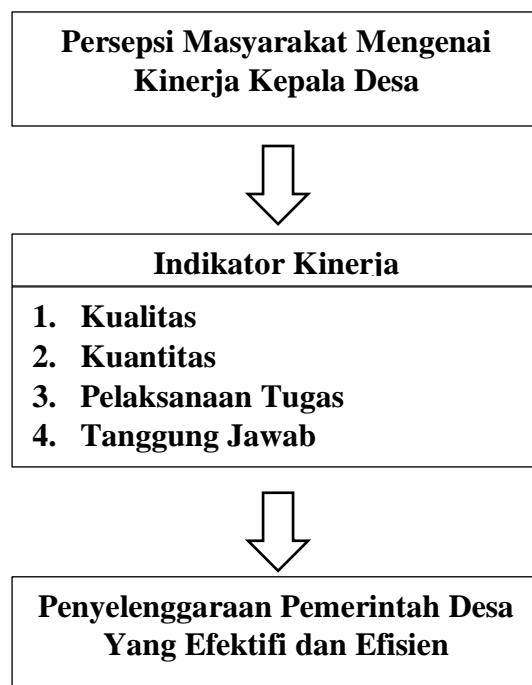
Persepsi merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap suatu isu yang terjadi. Persepsi dapat dijadikan penambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas. Sedangkan masyarakat merupakan bagian pendukung yang terpenting agar suatu Negara dapat terwujud. Jadi persepsi masyarakat merupakan cara pandang yang dilakukan oleh masyarakat berguna untuk memberikan sebuah kesimpulan bagaimana keadaan yang sedang terjadi.

Otonomi desa merupakan kewenangan desa yang otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan Otonomi Desa mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain: menumbuh kembangkan desa dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian desa dan meningkatkan daya saing desa dalam proses pertumbuhan. Kemudian dampak pemberian otonomi desa tidak hanya terjadi pada organisasi atau administratif lembaga pemerintahan desa saja melainkan berlaku juga pada masyarakat (publik) badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Otonomi desa tidak dipandang semata-mata sebagai

hak dan wewenang, melainkan tanggung jawab sehingga bagi desa dituntut mengembangkan sumber daya manusia.

Persepsi masyarakat Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato mengenai kinerja kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Terlebih lagi bagi masyarakat yang ada di desa tersebut harus memberikan sebuah pandangan yang positif mengenai kinerja yang dilakukan pemerintah sekaligus membangun keadaan otonomi desa tersebut agar menjadi lebih baik. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini di gambarkan dibawah ini :

Gambar : Kerangka Pemikiran



Sumber : Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75)

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Kepala Desa. Lokasi Penelitian ini bertempat di Kantor Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato direncanakan selama 3 bulan.

3.2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk membuat deksriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat secara hubungan antar fenomenal yang menjadi fokus penelitian.

.Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalamann (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. Penelitian kualitatif bersifat *fleksibel* dan berubah sesuai kondisi lapangan sehingga peran peneliti sangat dominan terhadap keberhasilan penelitian. Metode pendekatan deskriptif lebih spesifik digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini memberikan gambaran atau penjabaran suatu objek penelitian berdasarkan karakteristik yang dimiliki, disini peneliti terjun langsung ke lapangan.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional adalah indikator-indikator yang dipakai untuk menjawab masalah dengan mengacu pada batasan yang dibuat untuk mengoperasionalisasikan konsep-konsep atau variabel-variabel penelitian. Demi

tercapainya kesamaan pengertian dalam penelitian ini, maka berikut dikemukakan beberapa defenisi operasional yang meliputi :

5. Kualitas

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.

6. Kuantitas

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.

7. Pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.

8. Tanggung Jawab

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi menurut Suharyadi, (2003:9) adalah keseluruhan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian sedangkan menurut Freud (1981:90), populasi adalah keseluruhan objek yang diamati yang memenuhi persyaratan atau fenomena yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian populasi merupakan sumber penyimpulan atas

suatu fenomena. Populasi dalam penelitian ini desa botubilotahu kecamatan marisa dengan jumlah penduduk terdiri dari 2.594 jiwa dan 731 KK.

3.4.2. Sampel

Sugiyono (2008:81) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena populasi berukuran lebih dari 100, maka karena pertimbangan tenaga waktu dan dana sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu metode penarikan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mampu dan mengetahui persepsi masyarakat mengenai Kinerja Kepala Desa di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa. Adapun sampel atau responden dalam penelitian ini dirincikan sebagai berikut :

1. Aparat Desa	9 Orang
2. BPD	7 Orang
3. Kepala-Kepala Dusun	4 orang
4. <u>Tokoh Masyarakat</u>	<u>15 Orang</u>
Total	35 Orang

3.4. Jenis Dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan teknik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara langsung kepada para informan dan melalui pembagian kuesioner.

2. Data diperolah melalui studi pustaka (*Library Search*) yaitu mengambil data dari sejumlah buku, literatur, internet, dokumentasi maupun perundang-undangan, dokumen yang sudah ada, dan beberapa data penting lainnya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sekunder dan data primer yang akurat maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori sebagai perangkat analisis dalam pemecahan masalah melalui literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

- b. Studi Lapang(*Field Research*)

Studi lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek (lokasi penelitian)
- Wawancara(*interview*), yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis statistic deskriptif yaitu dengan menggunakan skala Likert. Untuk keperluan analisis secara kuantitatif, maka jawaban-jawaban responden diberi skor :

- a. Jawaban sangat memuaskan diberi bobot 4,

- b. Jawaban memuaskan diberi bobot 3,
- c. Jawaban kurang memuaskan diberi bobot 2,
- d. Jawaban tidak memuaskan diberi bobot 1,

Dari skala Likert di atas mengingat ada 4 kategori skor maka dapat dikelompokkan dalam 4 kelas interval. Berikut ini merupakan rentang kelas interval dari jawaban responden :

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Nilai tertinggi-nilai terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\text{Interval kelas} = \frac{4 - 1}{4} = 0.75$$

Dari skala tersebut dapat didistribusikan terhadap jawaban responden :

- a. $3,25 - 4,00 =$ Sangat Baik
- b. $2,49 - 3,24 =$ Baik
- c. $1,73 - 2,48 =$ Kurang Baik
- d. $0,97 - 1,72 =$ Tidak Baik

Selanjutnya jawaban responden dapat ditentukan berdasarkan total skor masing-masing jawaban. Untuk menentukan persentase jawaban maka digunakan rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan :

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Désa Botubilotahu Kecamatan Marisa

Pada tahun 1933 tepatnya Jaman Belanda di Marisa yang pada saat itu masih termasuk wilayah Marisa Ke-Kepala Désaan Paguat terdàpat pertambangan Belanda, tepatnya di kampong Hele (Sekarang Désa Hulawa). Satu – satunya jalan menuju lokasi pertambangan tersebut untuk mengangkut perlengkapan pembangunan dari pantai Marisa hanyalah melewati jalan Désa Marisa Utara.

Dipertengahan jalan tepatnya di pusat Désa Marisa Utara terdàpat sebuah batu besar yang menutupi jalan sehingga tidak dàpat di lalui oleh orang – orang Belanda. Untuk tidak menghalangi jalan mereka, Batu tersebut dipecahkan dengan menggunakan dinamik. Merekapun berhasil memecahkan batu itu dan jalanpun terbuka.

Sejak saat itulah terbentuklah perkembangan baru dengan sebutan **Botubilotahu** yang sering disebut Batu Pasang. Pada tahun 2002, dengan memperhatikan kriteria yang ada. Pemerintah setempat mengadakan Perencanaan tentang Pemekaran Désa. Yang pada tahun 2003 Pemekaran tersebut terjadi. Désa pemekaran ini akhirnya resmi dimekarkan dan diberi nama “**Désa Botubilotahu**”. Dan nama Batu Pasang sekarang ini sudah menjadi nama dusun di Désa Marisa Utara Kecamatan Marisa.

A. Sejarah Tokoh/Pemimpin Désa Botubilotahu

**Tabel-1 Nama-nama Kepala Désa
Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Désa Botubilotahu**

No	Periode	Nama Kepala Désa	Lama Menjabat	KET.
1	2003 - 2004	PAKAYA SULEMAN	2 Tahun	Plh
2	2004 - 2008	HAMID ISHAK	5 Tahun	Definit
3	2009 - 2014	ONE MBUINGA	6 Tahun	Definit
4	2015 - 2016	RONALD IDRUS,S.Sos	1 Tahun	Plh
5	2016 - 2022	ONE MBUINGA	6 Tahun	Definit

Sumber : RPJM Désa Botubilotahu 2021

B. Sejarah Pembangunan Désa

Tabel-2 Sejarah Pembangunan Désa

No	Pembangunan/Kegiatan	Tahun	Keterangan
1	Pembangunan kantor desa	2004	BANDES
2	Pembangunan gedung SD (I)	1977	APBD
3	Pembangunan gedung SD (II)	1977	APBD
4	Pembangunan mesjid Nurul Iman	1962	SWADAYA
5	Pembangunan masjid AT-TAQWA	1953	SWADAYA
6	Pembangunan Mesjid AT-TAUHID	2007	SWADAYA
7	Pembangunan mesjid Al- Muhajirin	2003	SWADAYA
8	Pembangunan mesjid Nur-HIKMAH	2012	SWADAYA
9	Pembangunan TK- CERIA	2012	PNPM
10	Pembangunan TK-	2013	PNPM
11	Rumah Kumuh 12 Unit	2006-2007	APBD
12	Rumah Kumuh 15 Unit	2009-2014	APBD
13	Rumah Rehabilitasi 6 Unit	2013	
14	Rumah sehat 3 Unit	2015	APBD
15	Pembangunan SMP 2 N. Marisa	2005	APBD
16	Pembangunan Perpustakaan	2011	PNPM MPd
17	Pembangunan TPQ	2013	APBD
18	Pembangunan lapangan		APBD
19	Pembangunan Posyandu	2011	PNPM
20	Pembangunan KB. LAKI-LAKI	2013	APBD
21	MCK Umum 10 Unit	2009-2011	PNPM MpD
22	MCK UMUM 6 Unit	2015	APBD
23	Pembangunan PAUD KB-ILOPONU	2011	APBD
24	Pembangunan RSUD	2003	APBD

Sumber : RPJM Désa Botubilotahu 2021

4.1.2. Visi dan Misi Désa Botubilotahu

1) Visi

Visi dèsa botubilotahu adalah : Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Adil,

Bertanggung Jawab Dan Madani

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

Mewujudkan : Terkandung di dalamnya peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Désa Botubilotahu yang mandiri secara ekonomi.

Pemerintahan : Satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa Botubilotahu.

Bersih : Tidak memungut kepada masyarakat tentang administarasi pembayaran kecuali yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang..

Adil : Di setiap Kepemimpinan harusa di dasari dengan sikap adil dalam mengambil suatu keputusan dalam bermasyarakat maupun dalam Pelayanan.

Bertanggung jawab : pemimpin dalam kondisi apapun harus tetap bertanggung jawab dalam pemerintahannya.

Madani : dalam Visi, Misi Pak bupati, kepala dèsa menyelaraskan visi,misi pak bupati. Yakni madani.

2) Misi Desa Botubilotahu

Misi Désa Botubilotahu merupakan turunan dari Visi Désa Botubilotahu. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Désa Botubilotahu merupakan penjabaran lebih operasional dari Visi. Dan merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran Désa yang hendak dicapai. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Désa Botubilotahu terutama lebih mendekatkan diri kepada Pelayanan Masyarakat.

4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Désa Botubilotahu

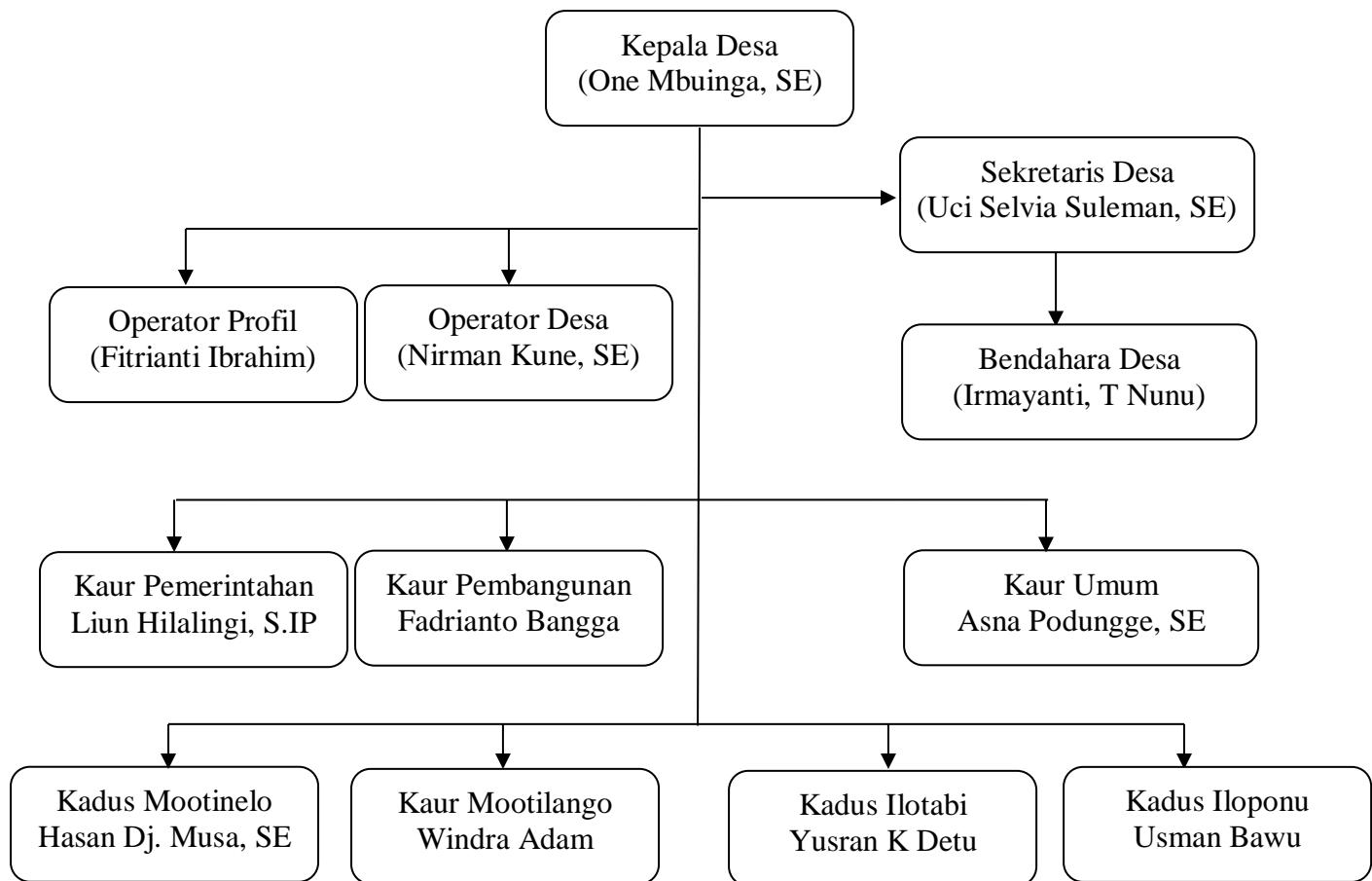
Tabel-3 : Struktur Pemerintah Désa

No	Nama	Jabatan	Usia	Masa Jabatan	Pend.
1	One Mbuinga, SE	Kepala Désa	40 thn	2016 - 2022	S1
2	Uci Selvia Suleman	Sekretaris Désa	25 thn	2015 - skrg	S1
3	Irmayanti t. Nunu	Bendahara	21 thn	2016	SLTA
4	Liun Hilalingo	Kaur Pemerintahan	24 thn	2015 – skrg	S1
5	Fandriyanto Bangga	Kaur Pembangunan	19 thn	2016	SLTA
6	Asma Podungge	Kaur Umum	37 thn	2015 – skrg	S1
7	Hasna Dj Musa	Kepala Dusun Mootinelo	27 thn	2015 – skrg	S1
8	Windra Adam	Kepala Dusun Mootilango	thn	2015 - skrg	Paket C
9	Yusran k. Detu	Kepala Dusun Ilotabi	thn	2015- Skrng	Paket C
10	Usman Bau	Kepala Dusun Iloponu	thn	2015- Skrng	SLTA

Sumber : RPJM Désa Botubilotahu 2021

Adapun bagan struktur Organisasi Pemerintah Désa Botubilotahu di gambarkan seperti di bawah ini :

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Dèsa Botubilotahu



Sumber : RPMJDes Botubilotahu 2021

4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Désa

Tugas dan fungsi pemerintahan desa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai berikut :

A. Kepala Désa

1. Tugas kepala desa adalah sebagai berikut :

- Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Désa (RPJM Désa)
- Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Désa (RKP Désa)
- Mensosialisasikan RKP Désa, APB Désa dan rencana kerja kepada masyarakat

2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Désa mempunyai Wewenang :

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- Mengajukan rancangan Peraturan Désa.
- Menetapkan Peraturan Désa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Désa mengenai APB Désa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- Membina kehidupan masyarakat desa
- Membina perekonomian desa
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangan

3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, Kepala

Desa mempunyai Kewajiban :

- Memegang teguh dan mengasmalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat;
- Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

- Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; serta
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

B. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- Pelaksana urusan surat-menjurut, kearsipan dan laporan
- Pelaksana urusan administrasi keuangan;
- Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; serta
- Pelaksana tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan.

C. Bendahara Desa

Bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara desa merupakan bagian dari PTPKD. PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDdesa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

D. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas kepala urusan pemerintahan, sebagai berikut :

- Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintahan desa.
- Membantu sekretaris desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan desa;
- Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat; dan
- Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun

E. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas kepala urusan pembangunan sebagai berikut :

- Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa
- Membantu membina perekonomian desa
- Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa;

F. Kepala Urusan Umum

Tugas kepala urusa umum, sebagai berikut :

- Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa;
- Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum;
- Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah;
- Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
- Membina dan melayani administrasi kependudukan; dan

G. Kepala Dusun

Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kebijakan dan kegiatan kepala desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Kepala dusun mempunyai fungsi:

- pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya; dan
- pelaksana kebijakan kepala desa

4.1.5. Karakteristik Responden

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa teknik penarikan sample pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, maka pemilihan sampel responden telah dilakukan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 35 orang. Ke-35 orang tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda, baik dari segi umur, pendidikan, maupun pekerjaan.

1. Usia Responden

Karakteristik responden menurut usia secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel-4
Karakteristik Responden Menurut Umur**

USIA	FREKUENSI (f)	PERSENTASE (%)
20 – 29 Tahun	7	20,00
30 – 39 Tahun	10	28,57
40 – 49 Tahun	12	34,28
50 – 59 Tahun	4	11,42
≥60 Tahun	2	5,71
JUMLAH	35	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisioner, Januari 2022

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa komposisi yang mendominasi pada penelitian ini yaitu pada usia 40-49 tahun yaitu sebesar 34,28 %, selanjutnya responden pada usia 30-39 tahun yaitu sebesar 28,57 %, sedangkan pada usia ≥ 60 Tahun adalah responden yang paling sedikit yaitu sebesar 5,71 %.

Usia 40-49 merupakan frekuensi yang paling banyak di lokasi penelitian. Peneliti mendapatkan bahwa pada usia ini, pengetahuan masyarakat desa terbilang

sudah tinggi, dan sesuai dengan metode pengambilan sampel, *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut-paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya serta dianggap mampu memberikan informasi dan data-data yang akurat.

2. Jenis Kelamin

Tabel-5
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI (F)	PERSENTASE (%)
1	Laki-laki	26	74,28
2	Perempuan	9	25,71
JUMLAH		35	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisioner, 2022

Berdasarkan komposisi responden pada jenis kelamin, responden pada laki-laki sebesar 74,28 % atau 26 orang, sedangkan pada perempuan sebesar 25,71 % atau 9 orang.

Berdasarkan rasio diatas, jumlah responden laki-laki merupakan yang paling banyak, hal ini didasari karena responden laki-laki selalu bergelut dengan aktivitas keseharian jadi lebih mengetahui tentang permasalahan. Sedangkan perempuan merupakan pekerja pasif di rumah.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal yang utama dalam pencapaian hasil penelitian ini. Tingkat pendidikan pada responden sangat berpengaruh pada kemampuan memberikan informasi terkait dengan objek penelitian ini. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah dan masyarakat yang memiliki

pendidikan tinggi akan dapat melihat serta memahami persoalan yang dibutuhkan dalam pembangunan di desa.

Tabel-6
Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	FREKUENSI(F)	PERSENTASE(%)
1	Tidak sekolah/tidak tamat	3	8,57
2	SD	2	7,89
3	SD/sederajat tamat	10	23,68
4	SLTP/sederajat tamat	11	34,21
5	SMA/sederajat tamat	5	15,78
6	Diploma tamat	4	18,42
7	S1 tamat	0	0,00
8	S2 Tamat		
JUMLAH		35	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisioner, 2022

Pada tabel diatas 6 dapat dilihat adanya tingkat perbedaan responden. Dari seluruh responden tingkat pendidikan SMA/sederajat mendominasi dengan 11 orang atau sebesar 34,21 %, SLTP/sederajat dengan 10 orang atau 23,68 %, Diploma 5 orang atau sebesar 15,78%, lalu Sarjana strata satu 4 orang atau 18,42%

Dari penjelasan di atas dapat dilihat tingkat pendidikan di Desa Botubilotahu masih tergolong baik, adapun responden tamatan SMA, Diploma, Sarjana adalah yang paling banyak didominasi mereka yang bekerja sebagai PNS, guru status PNS, dan guru status Honorer. SLTP dan SD adalah mereka sekarang bekerja sebagai petani dan berkebun. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan responden yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Jadi bisa dikatakan pendidikan pada Desa Botubilotahu masih tergolong baik.

4. Pekerjaan

Tabel-7
Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	FREKUENSI (F)	PERSENTASE (%)
1	Pedagang	3	8,57
2	Petani	18	51,42
3	PNS	2	5,71
4	Guru Pns/honorer	6	17,14
5	Wiraswasta	3	8,57
6	Lainnya	3	8,57
JUMLAH		35	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisioner, 2022

Berdasarkan tabel 7 pekerjaan yang paling banyak adalah petani dengan 18 orang atau 51,42%, Guru status PNS/Honorer 6 orang atau 17,14%, Wiraswasta dan Lainnya masing masing 3 orang atau 8,57%, PNS di Instansi lain 2 orang atau 5,71%. Pekerjaan lain yang dimaksud disini terbagi atas beberapa antara lain IRT, penyadap,serta sopir.

Sesuai dengan teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yang dilakukan secara “*Purposive Sampling*” maka peneliti sengaja mempeta-petakan responden agar dapat menentukan jawaban yang bisa diharapkan dalam pengembangan penelitian ini dengan harapan bahwa responden akan mampu memberikan informasi dan data-data yang akurat.

4.2. Hasil Penelitian Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Kepala Desa

Kepala desa merupakan birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi di tingkat desa. Kepala desa sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat. Sosok kepala desa merupakan orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. Selain sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elit lokal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Besarnya pengaruh kedudukan kepala desa terhadap masyarakat, sering menjadikannya sebagai panutan bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dibantu oleh perangkat desanya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa.

Tujuan penelitian ini penulis adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh berkaitan dengan bagaimana persepsi masyarakat tentang kinerja kepala desa botubilotahu yang pada tahun kemarin sempat dinonaktifkan langsung melalui Surat Keputusan Bupati Pohuwato disebabkan menurut masyarakat dan BPD bahwa kepala desa melalukan penyelewengan dana covid, namun karena tidak cukup bukti sehingga yang bersangkutan di aktifkan kembali sampai saat ini masih menjabat sebagai kepala desa botubilotahu sampai akhir periodennya. Adapun dalam mengukur persepsi masyarakat tentang kinerja kepala desa botubilotahu, penulis menggunakan 4 (empat) indikator kinerja kepala desa yang bersumber dari Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) yakni indikator kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Setelah dilakukan penelitian dengan

menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan sebagai alat pengumpulan data pokok atau data primer yang dibagikan dan diisi oleh 35 orang responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mengukur persepsi masyarakat serta berdasarkan temuan peneliti dilapangan, maka hasil penelitian berdasarkan 4 (empat) indikator tersebut diuraikan sebagai berikut :

4.2.1. Indikator Kualitas

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan atau pemimpin mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Kualitas yang dimaksud disini adalah bagaimana seorang pemimpin dalam hal ini kepala desa bukan hanya memiliki jiwa leadership sebagai pemimpin, namun lebih dari itu seorang pemimpin yang berkualitas di tuntut harus memiliki kemampuan dan kapasitas serta kapabilitas dirinya sebagai seorang pemimpin sehingga dapat mengayomi bawahan dan masyarakatnya. Adapaun kualitas kepala desa botubilotahu berdasarkan tanggapan responden di sajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel-8

Persepsi Responden terhadap Kepala Desa Botubilotahu Memiliki Kualitas Dan Kapabilitas Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Kepala Desa

TANGGAPAN RESPONDEN	BOBOT (I)	FREKUENSI (F)	PERSENTASE (%)	I x F
Sangat Memiliki	4	14	40.0	56
Memiliki	3	12	34.3	36
Kurang Memiliki	2	9	25.7	18
Tidak Memiliki	1	0	0	0
JUMLAH		35	100,00	110
Skor Rata-Rata = 110/35 = 3.14				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2022

Dengan melihat tabel-8 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah kepala desa botubilotahu memiliki kualitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa”. Berdasarkan jawaban responden didapatkan sebanyak 14 orang atau 40,0% memberikan jawaban “Sangat Memiliki” dengan skor 56, sebanyak 12 orang atau 34.3% memberikan jawaban “Memiliki” dengan skor 36, dan sebanyak 9 orang atau 25.7% menjawab “Kurang Memiliki” dengan skor 18. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi sebagian responden bahwa kepala desa botubilotahu memiliki kualitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa. Adapun masih terdapat responden memberikan jawaban bahwa kepala desa kurang memiliki kualitas dan kapabilitas, disebabkan oleh masih ada sekelompok masyarakat desa botubilotahu belum merasa puas dengan kepemimpinan kepala desa. Tanggapan ini secara keseluruhan mendapatkan total skor sebanyak 110, sedangkan skor rata-rata adalah 3.14, hal ini berdasarkan skala interval jawaban responden termasuk pada kategori **BAIK.**

Tabel-9
Persepsi Responden terhadap Kepala Desa Botubilotahu Pernah Melakukan Kesalahan Dalam Kepemimpinannya

TANGGAPAN RESPONDEN	BOBOT (I)	FREKUENSI (F)	PERSENTASE (%)	I x F
Selalu	4	8	22.9	32
Sering	3	22	68.9	66
Kadang-kadang	2	5	14.2	10
Tidak Pernah	1	0	0	0
JUMLAH		35	100,00	108
Skor Rata-Rata = 108/35 = 3.09				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2022

Dengan melihat tabel-9 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah kepala desa botubilotahu pernah melakukan kesalahan dalam kepemimpinannya”. Berdasarkan jawaban responden didapatkan sebanyak 8 orang atau 22.9% responden memberikan jawaban kepala desa “Selalu” melakukan kesalahan dengan skor 32, sebanyak 22 orang atau 68.9% memberikan jawaban “Sering” dengan skor 66, dan sebanyak 5 orang atau 14.2% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi sebagian responden bahwa kepala desa botubilotahu melakukan kesalahan dalam kepemimpinannya karena sebagai manusia biasa tidak pernah luput dari khilaf dan salah, sehingga sehebat apapun seorang pemimpin, tetap ada kesalahan dan kehilafan dalam kepemimpinannya. Tanggapan ini secara keseluruhan mendapatkan total skor sebanyak 108, sedangkan skor rata-rata adalah 3.09, hal ini berdasarkan skala interval jawaban responden termasuk pada kategori **BAIK**.

Tabel-10
**Persepsi Responden terhadap Kepala Desa Botubilotahu Sudah
Menjalankan Kepemimpinannya Dengan Baik**

TANGGAPAN RESPONDEN	BOBOT (I)	FREKUENSI (F)	PERSENTASE (%)	I x F
Sangat Baik	4	12	34.3	48
Baik	3	9	25.7	27
Kurang Baik	2	14	40.0	28
Tidak Baik	1	0	0	0
JUMLAH		35	100,00	103
Skor Rata-Rata = 103/35 = 2,94				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2022

Dengan melihat tabel-10 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah kepala desa botubilotahu sudah menjalankan kepemimpinannya dengan

baik”. Berdasarkan jawaban responden didapatkan sebanyak 12 orang atau 34.3% memberikan jawaban “Sangat Baik” dengan skor 48, sebanyak 9 orang atau 25.7% memberikan jawaban “Baik” dengan skor 27, sedangkan sebanyak 14 orang atau 40.0% menjawab “Kurang Baik” dengan skor 28. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi sebagian responden bahwa kepala desa botubilotahu dalam menjalankan kepemimpinannya masih kurang baik dan kurang efektif, hal ini disebabkan dengan adanya permasalahan yang berdampak pada penonaktifan kepala desa meskipun tidak terbukti, namun hal tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kinerja kepala desa, hal ini dibuktikan dari 35 responden didapatkan sebesar 40.0% yang memberikan jawaban bahwa kepemimpinan kepala desa botubilotahu di mata mereka masih kurang baik. Tanggapan ini secara keseluruhan mendapatkan total skor sebanyak 110, sedangkan skor rata-rata adalah 3.14, meskipun mendapatkan persepsi yang kurang baik dari sebagian responden, namun berdasarkan skala interval jawaban responden masih termasuk pada kategori **BAIK**.

Tabel-11
Persepsi Responden terhadap Kepala Desa Botubilotahu Dalam Kepemimpinanya Penuh Perhitungan, Cermat Dan Teliti

TANGGAPAN RESPONDEN	BOBOT (I)	FREKUENSI (F)	PERSENTASE (%)	I x F
Sangat Cermat dan Teliti	4	4	11.4	8
Cermat dan Teliti	3	19	54.3	57
Kurang Cermat dan Teliti	2	9	25.7	18
Tidak Cermat dan Teliti	1	3	8.06	3
JUMLAH		35	100,00	86
Skor Rata-Rata = 86/35 = 2.46				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2022

Dengan melihat tabel-11 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah kepala desa botubilotahu dalam kepemimpinanya penuh perhitungan, cermat dan teliti”. Berdasarkan jawaban responden didapatkan sebanyak 4 orang atau 11.4% memberikan jawaban “Sangat Cermat dan Teliti” dengan skor 8, sebanyak 19 orang atau 54.3% memberikan jawaban “Cermat dan Teliti” dengan skor 57, sebanyak 9 orang atau 25.7% memberikan jawaban “Kurang Cermat dan Teliti” dengan skor 18, dan sebanyak 1 orang atau 8.06% menjawab “Tidak Cermat dan Teliti” dengan skor 3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi sebagian responden bahwa kepala desa botubilotahu dianggap masih kurang cermat dan teliti dalam menjalankan kepemimpinannya. Hal ini terbukti karena ketidak cermatan dan kurangnya perhitungannya sehingga membuat kepala desa botubilotahu di tahun 2021 kemarin tersandung kasus penyalahgunaan dana pencegahan covid, meskipun pada akhirnya dana tersebut dikembalikan, namun tidak merubah persepsi masyarakat tentang ketidak cermatan dan ketidak telitian seorang kepala desa. Tanggapan ini secara keseluruhan mendapatkan total skor hanya 86, sedangkan skor rata-rata adalah 2,46, hal ini berdasarkan skala interval jawaban responden termasuk pada kategori **KURANG BAIK**.

4.2.2. Indikator Kuantitas

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing. indikator kuantitas ini apabila dikaitkan dengan kinerja kepala desa botubilotahu yang berkaitan dengan tugas pokok, dan fungsi seorang kepala desa dalam menjalankan kempimpinannya dapat di lihat dari sejauhmana kepala desa

mampu memajukan masyarakat dan desanya, apakah kepemimpinan yang dijalankan sudah memenuhi ekspektasi atau harapan masyarakat, serta sejauhmana seorang kepala desa mampu menyelesaikan semua program desa berdasarkan visi dan misi serta program pemerintahan desa. Adapun hasil penelitian berdasarkan indikator tersebut disajikan dalam bentuk tabel frekuensi berikut ini :

Tabel-12
Persepsi Responden terhadap Kepala Desa Botubilotahu Selama 2 (Dua)
Periode Kepemimpinanya Telah Membawa Kemajuan Desa

TANGGAPAN RESPONDEN	BOBOT (I)	FREKUENSI (F)	PERSENTASE (%)	I x F
Sangat Maju	4	0	0	0
Maju	3	11	31.4	33
Kurang Maju	2	18	51.4	36
Tidak Maju	1	6	17.2	6
JUMLAH		35	100,00	75
Skor Rata-Rata = 75/35 = 2.14				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2022

Dengan melihat tabel-12 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah kepala desa botubilotahu selama 2 (dua) periode kepemimpinanya telah membawa kemajuan desa”. Berdasarkan jawaban responden didapatkan sebanyak 11 orang atau 31.4% memberikan jawaban “Maju” dengan skor 33, sebanyak 18 orang atau 51.4% memberikan jawaban “Kurang Maju” dengan skor 36, dan sebanyak 6 orang atau 17.2% menjawab “Tidak Maju” dengan skor 6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi sebagian responden bahwa selama 2 (dua) perioden kepemimpinan kepala desa, sampai saat ini desa botubilotahu dapat dikatakan belum menunjukkan kemajuan, hal ini dapat dibuktikan bahwa desa botubilotahu merupakan desa yang berada dekat dengan ibukota kabupaten, namun belum ada perkembangan desa maupun pembangunan

infrastruktur serta pengembangan sumber daya manusia yang terlihat di desa botubilotahu, hal ini menurut sebagian masyarakat bahwa kepala desa botubilotahu hanya fokus pada kepentingannya secara personal. Sehingga belum dapat membawa kemajuan desa dan masyarakat desa. Tanggapan ini secara keseluruhan mendapatkan total skor hanya 75, sedangkan skor rata-rata adalah 2,14, hal ini berdasarkan skala interval jawaban responden termasuk pada kategori **KURANG BAIK.**

Tabel-13
Persepsi Responden terhadap Pencapaian Kinerja Kepala Desa Botubilotahu Selama 2 (Dua) Periode Kepemimpinanya Telah Memenuhi Harapan Masyarakat

TANGGAPAN RESPONDEN	BOBOT (I)	FREKUENSI (F)	PERSENTASE (%)	I x F
Sangat Memenuhi	4	2	5.07	8
Memenuhi	3	8	22.9	24
Kurang Memenuhi	2	20	57.1	40
Tidak Memenuhi	1	5	14.3	5
JUMLAH		35	100,00	75

Skor Rata-Rata = 77/35 = 2.20

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2022

Dengan melihat tabel-13 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah pencapaian kinerja kepala desa botubilotahu selama 2 (dua) periode kepemimpinanya telah memenuhi harapan masyarakat”. Berdasarkan jawaban responden didapatkan sebanyak 2 orang atau 5.07% memberikan jawaban “Sangat Memenuhi” dengan skor 8, sebanyak 8 orang atau 22.9% memberikan jawaban “Memenuhi” dengan skor 24, sebanyak 20 orang atau 57.1% menjawab “Kurang Memenuhi” dengan skor 40. Sedangkan sebanyak 5 orang atau 14.3% memberikan jawaban “Tidak Memenuhi” dengan skor 5. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa menurut persepsi sebagian responden bahwa pencapaian kinerja kepala desa botubilotahu selama 2 (dua) periode kepemimpinanya belum dapat memenuhi harapan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan keberadaan desa botubilotahu yang berdekatan dengan ibu kota kabupaten namun, belum dapat menunjukkan kemajuan yang signifikan baik dari pembangunan infrastruktur desa maupun pembangunan suprastruktur desa yang belum Nampak sama sekali. Dari temuan peneliti didapatkan bahwa masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, begitupula masih terdapat pengangguran serta masyarakat yang masih bekerja sebagai kuli bangunan maupun pekerja serabutan. Tanggapan ini secara keseluruhan mendapatkan total skor sebanyak 110, sedangkan skor rata-rata adalah 3.14, meskipun mendapatkan persepsi yang kurang baik dari sebagian responden, namun berdasarkan skala interval jawaban responden masih termasuk pada kategori **BAIK.**

Tabel-14
Persepsi Responden terhadap Kepala Desa Botubilotahu Mampu
Menyelesaikan Semua Program Desa

TANGGAPAN RESPONDEN	BOBOT (I)	FREKUENSI (F)	PERSENTASE (%)	I x F
Sangat Mampu	4	2	5.07	8
Mampu	3	11	31.4	33
Kurang Mampu	2	20	57.07	40
Tidak Mampu	1	2	5.07	2
JUMLAH		35	100,00	83
Skor Rata-Rata = 83/35 = 2.37				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2022

Dengan melihat tabel-14 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah kepala desa botubilotahu mampu menyelesaikan semua program desa”. Berdasarkan jawaban responden didapatkan sebanyak 2 orang atau 5.07%

memberikan jawaban “Sangat Mampu” dengan skor 8, sebanyak 11 orang atau 31.4% memberikan jawaban “Mampu” dengan skor 33, sebanyak 20 orang atau 57.1% menjawab “Kurang Mampu” dengan skor 40. Sedangkan sebanyak 2 orang atau 5.07% memberikan jawaban “Tidak Mampu” dengan skor 2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi sebagian responden bahwa kepala desa botubilotahu pada periode kedua ini dianggap belum mampu menyelesaikan program desa, mengingat masa jabatan atau masa periode yang bersangkutan sebagai kepala desa akan segera berakhir, namun masih terdapat program-program desa yang sudah direncanakan melalui musdes maupun musrenbangdes belum berjalan maksimal dan efektif, salah satu penyebabnya juga dari pengamatan peneliti dikarekan banyak program desa yang tidak jalan selama kepala desa dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Tanggapan ini secara keseluruhan mendapatkan total skor sebanyak 83, sedangkan skor rata-rata adalah 2.37, berdasarkan skala interval jawaban responden masih termasuk pada kategori

KURANG BAIK.

4.2.3. Indikator Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh pegawai atau pemimpin mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. Indikator pelaksanaan tugas ini apabila di kaitkan dengan pelaksanaan tugas seorang kepala desa, maka indikator ini dapat mengukur kinerja kepala desa antara lain sejauhmana kepala desa mampu memahami tugas-tugas serta tanggung jawabnya sebagai kepala desa, kemudian dalam pelaksanaan tugas kepala desa apakah yang bersangkutan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan setiap permasalahan

yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, serta sejauhmana kepala desa mampu juga dalam menyelesaikan permasalahan pada pemerintahannya. Adapaun hasil penelitian berkaitan dengan indikator pelaksanaan tugas kepala desa botubilotahu di sajikan dalam bentuk tabel frekuensi berikut ini :

Tabel-15
Persepsi Responden Terhadap Kepala Desa Botubilotahu Memahami Tugas-Tugas Kepala Desa

TANGGAPAN RESPONDEN	BOBOT (I)	FREKUENSI (F)	PERSENTASE (%)	I x F
Sangat Memahami	4	14	40.0	56
Memahami	3	11	31.4	33
Kurang Memahami	2	10	28.6	20
Tidak Memahami	1	0	0	0
JUMLAH		35	100,00	109
Skor Rata-Rata = 109/35 = 3.11				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2022

Dengan melihat tabel-15 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah kepala desa botubilotahu memahami tugas-tugas kepala desa”. Berdasarkan jawaban responden didapatkan sebanyak 14 orang atau 40.0% memberikan jawaban “Sangat Memahami” dengan skor 56, sebanyak 11 orang atau 31.4% memberikan jawaban “Memahami” dengan skor 33. Sedangkan sebanyak 10 orang atau 28.6% memberikan jawaban “Kurang Memahami” dengan skor 20. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi sebagian responden bahwa kepala desa botubilotahu pada dasarnya sangat memahami tugas-tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin atau kepala desa, hal ini terbukti beliau mampu memimpin selama 2 (dua) periode, yang membuktikan bahwa kepala desa sangat memahami tugas-tugas sebagai kepala desa. Tanggapan ini secara keseluruhan

mendapatkan total skor sebanyak 109, sedangkan skor rata-rata adalah 3.11, berdasarkan skala interval jawaban responden termasuk pada kategori **BAIK**.

Tabel-16
Persepsi Responden Terhadap Kepala Desa Botubilotahu Mampu
Menyelesaikan Permasalahan-Permasalahan Desa

TANGGAPAN RESPONDEN	BOBOT (I)	FREKUENSI (F)	PERSENTASE (%)	I x F
Sangat Mampu	4	4	11.4	16
Mampu	3	8	22.9	24
Kurang Mampu	2	22	62.9	44
Tidak Mampu	1	1	2.86	1
JUMLAH		35	100,00	85
Skor Rata-Rata = 85/35 = 2.43				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2022

Dengan melihat tabel-16 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah kepala desa botubilotahu mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan desa”. Berdasarkan jawaban responden didapatkan sebanyak 4 orang atau 11.4% memberikan jawaban “Sangat Mampu” dengan skor 16, sebanyak 8 orang atau 22.9% memberikan jawaban “Mampu” dengan skor 24, sebanyak 22 orang atau 62.9% memberikan jawaban “Kurang Mampu” dengan skor 44. Sedangkan sebanyak 1 orang atau 2.86% memberikan jawaban “Tidak Mampu” dengan skor 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi sebagian responden bahwa kepala desa botubilotahu dipersepsikan kurang mampu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan desa, hal ini dibuktikan dengan ada beberapa permasalahan desa yang kemudian tidak mampu diselesaikan oleh kepala desa sehingga menyebabkan aparat desa terpecah belah dengan permasalahan tersebut, salah satunya dari temuan peneliti tentang permasalahan desa yang tidak mampu ditangani oleh kepala desa adalah masalah pergantian

sepihak aparatur desa oleh kepala desa yang kemudian tidak memiliki alasan yang rasional, dimana pergantian tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan politik dan dianggap tidak loyal terhadap kepala desa meskipun tidak yang dapat membuktikan hal tersebut. Tanggapan ini secara keseluruhan mendapatkan total skor sebanyak 85, sedangkan skor rata-rata adalah 2.43, berdasarkan skala interval jawaban responden termasuk pada kategori **KURANG BAIK**.

Tabel-17
Persepsi Responden Terhadap Kepala Desa Botubilotahu Mampu Setiap Permasalahan Yang Terjadi Ditengah-Tengah Masyarakat

TANGGAPAN RESPONDEN	BOBOT (I)	FREKUENSI (F)	PERSENTASE (%)	I x F
Sangat Mampu	4	8	22.9	32
Mampu	3	14	40.0	42
Kurang Mampu	2	13	37.1	26
Tidak Mampu	1	0	0	0
JUMLAH		35	100,00	100
Skor Rata-Rata = 100/35 = 2.86				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2022

Dengan melihat tabel-17 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah kepala desa botubilotahu mampu setiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat”. Berdasarkan jawaban responden didapatkan sebanyak 8 orang atau 22.9% memberikan jawaban “Sangat Mampu” dengan skor 32, sebanyak 14 orang atau 40.0% memberikan jawaban “Mampu” dengan skor 42, dan sebanyak 13 orang atau 3.71% memberikan jawaban “Kurang Mampu” dengan skor 26. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi sebagian responden bahwa kepala desa botubilotahu dipersepsikan mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Adapun terdapat beberapa responden yang mempersepsikan kurang mampu, karena mereka

menganggap masih banyak persoalan dan permasalahan masyarakat yang tidak mendapatkan solusi yang baik dari kepala desa. Tanggapan ini secara keseluruhan mendapatkan total skor sebanyak 100, sedangkan skor rata-rata adalah 2.86, berdasarkan skala interval jawaban responden pernyataan tersebut termasuk pada kategori **BAIK**.

4.2.4. Indikator Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan. Tanggung jawab termasuk tingkat laku manusia, untuk sadar akan perbuatan dan kewajiban yang harus dilakukan. Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban pegawai atau pimpinan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan organisasi. Kepala desa bertanggung jawab dalam Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan; dan Pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini, indikator yang dapat mengukur sejauhmana tanggung jawab kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan kinerjanya dapat dilihat dari tanggung jawab kepala desa botubilotahu dalam menjalankan kepemimpinannya, tanggung jawab kepala desa botubilotahu dalam memperbaiki setiap kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan kepemimpinannya, serta tanggung jawab kepala desa botubilotahu bersedia mengambil resiko dalam setiap keputusan. Adapun hasil penelitian berkaitan

dengan indikator tanggung jawab kepala desa tersebut disajikan dalam bentuk tabel frekuensi berikut ini :

Tabel-18
**Persepsi Responden Terhadap Kepala Desa Botubilotahu Memiliki
Tanggung Jawab Dalam Menjalankan Kepemimpinannya**

TANGGAPAN RESPONDEN	BOBOT (I)	FREKUENSI (F)	PERSENTASE (%)	I x F
Selalu	4	12	34.3	48
Sering	3	16	45.7	48
Kadang-Kadang	2	7	20.0	14
Tidak Pernah	1	0	0	0
JUMLAH		35	100,00	110
Skor Rata-Rata = 110/35 = 3.14				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2022

Dengan melihat tabel-18 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah kepala desa botubilotahu memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinannya”. Berdasarkan jawaban responden didapatkan sebanyak 12 orang atau 34.3% memberikan jawaban “Selalu” dengan skor 48, sebanyak 16 orang atau 45.7% memberikan jawaban “Sering” dengan skor 48, dan sebanyak 7 orang atau 20.0% memberikan jawaban “Kadang-Kadang” dengan skor 14. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi sebagian responden bahwa kepala desa botubilotahu selama 2 (dua) periode kepemimpinannya, dianggap sering bertanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinannya, karena tanggung jawab kepala desa sebagai pemimpin bukan hanya sekedar menyelenggarakan pemerintahan desa, namun lebih dari itu kepala desa harus mampu melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Tanggapan ini secara keseluruhan mendapatkan total skor sebanyak 110, sedangkan skor rata-rata adalah

3.14, berdasarkan skala interval jawaban responden pernyataan tersebut termasuk pada kategori **BAIK**.

Tabel-19
Persepsi Responden Terhadap Kepala Desa Botubilotahu Selalu Memperbaikinya Apabila Melakukan Kesalahan

TANGGAPAN RESPONDEN	BOBOT (I)	FREKUENSI (F)	PERSENTASE (%)	I x F
Selalu	4	4	11.4	16
Sering	3	11	31.4	33
Kadang-Kadang	2	20	57.2	40
Tidak Pernah	1	0	0	0
JUMLAH		35	100,00	89
Skor Rata-Rata = 89/35 = 2.54				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2022

Dengan melihat tabel-19 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah kepala desa botubilotahu selalu memperbaikinya apabila melakukan kesalahan”. Berdasarkan jawaban responden didapatkan sebanyak 4 orang atau 11.4% memberikan jawaban “Selalu” dengan skor 16, sebanyak 11 orang atau 31.4% memberikan jawaban “Sering” dengan skor 33, dan sebanyak 20 orang atau 57.2% memberikan jawaban “Kadang-Kadang” dengan skor 40. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi sebagian responden bahwa kepala desa botubilotahu selama ini kadang-kadang bertanggung jawab dalam memperbaiki kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan kepemimpinannya. Sesuai informasi yang peneliti dapat dari responden bahwa kepala desa botubilotahu jarang sekali mengakui kesalahan dan kekeliruannya kepada masyarakat, apabila terjadi kesalahan berkaitan dengan pemerintahan desa dengan masyarakat, kepala desa tidak serta merta memperbaiki kesalahan tersebut dihadapan publik atau masyarakat. Tanggapan ini secara keseluruhan mendapatkan total skor sebanyak

89, sedangkan skor rata-rata adalah 2.54, berdasarkan skala interval jawaban responden pernyataan tersebut meskipun mendapatkan persepsi yang rendah dari responden namun masih termasuk pada kategori **BAIK**.

Tabel-20
Persepsi Responden Terhadap Kepala Desa Botubilotahu Bersedia Mengambil Resiko Dalam Setiap Keputusan

TANGGAPAN RESPONDEN	BOBOT (I)	FREKUENSI (F)	PERSENTASE (%)	I x F
Selalu	4	18	51.4	72
Sering	3	11	31.4	33
Kadang-Kadang	2	6	17.2	12
Tidak Pernah	1	0	0	0
JUMLAH		35	100,00	117
Skor Rata-Rata = 117/35 = 3.34				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2022

Dengan melihat tabel-20 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah kepala desa botubilotahu bersedia mengambil resiko dalam setiap keputusan”. Berdasarkan jawaban responden didapatkan sebanyak 18 orang atau 51.4% memberikan jawaban “Selalu” dengan skor 72, sebanyak 11 orang atau 31.4% memberikan jawaban “Sering” dengan skor 33, dan sebanyak 6 orang atau 17.2% memberikan jawaban “Kadang-Kadang” dengan skor 12. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi sebagian responden bahwa kepala desa botubilotahu selama 2 (dua) periode kepemimpinannya selalu bersedia mengambil resiko dalam setiap keputusan, kepala desa botubilotahu dikenal memiliki keberanian dalam setiap pengambilan keputusan apapun resikonya ketika hal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanggapan ini secara keseluruhan mendapatkan total skor sebanyak 117, sedangkan skor rata-rata

adalah 3.34, berdasarkan skala interval jawaban responden pernyataan tersebut termasuk pada kategori **SANGAT BAIK**.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengertian persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam memberikan kesimpulan dalam suatu obyek berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun obyeknya sama. Sedangkan Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Untuk mengukur Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Kepala Desa di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa, menggunakan 4 (empat) indikator yang bersumber dari Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) antara lain : Kualitas, Kuantitas, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab, yang kemudian pembahasan hasil penelitian tersebut di uraikan dibawah ini :

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang kinerja kepala desa botubilotahu yang di ukur melalui dimensi kualitas, dapat disimpulkan dari keempat pertanyaan dalam indikator tersebut mendapatkan tanggapan Baik berdasarkan perhitungan skala interval jawaban responden, namun yang paling mendapatkan persepsi yang kurang dan rendah dari masyarakat adalah berkaitan dengan pertanyaan bahwa kepala desa botubilotahu sudah menjalankan kepemimpinannya dengan baik dimana rata-rata skor pada item pertanyaan tersebut hanya 2.94. Sedangkan untuk pertanyaan

mengenai apakah kepala desa dalam kepemimpinannya penuh perhitungan, cermat dan teliti mendapatkan persepsi yang sangat direndah dari masyarakat, dimana persepsi tersebut rata-rata hanya sebesar 2.46, hal tersebut menurut perhitungan skala interval jawaban responden masuk pada kategori Kurang Baik. Persepsi masyarakat tersebut didasari oleh di beberapa tahun terakhir kepala desa botubilotahu sering tersandung kasus penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan, meskipun tidak sampai ke ranah pengadilan karena yang bersangkutan mampu mempertanggugjawabkannya, namun hal tersebut sudah mendapatkan persepsi yang buruk oleh masyarakat desa botubilotahu.

Berdasarkan hasil penelitian dari tanggapan dan persepsi masyarakat tentang kinerja kepala desa botubilotahu yang disajikan melalui tabel frekuensi tersebut diatas yang dikorelasikan dengan temuan peneliti dilapangan, maka secara keseluruhan bahwa indikator kuantitas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab kepala desa dalam menjalankan kepemimpinanya mendapatkan persepsi yang rendah atau KURANG BAIK dari responden. Hal ini membuktikan bahwa dari sisi kuantitas yang berkaitan dengan pencapaian kinerja kepala desa botubilotahu selama 2 (dua) periode kepemimpinannya menunjukan bahwa kinerja kepala desa botubilotahu masih kurang baik atau tidak dapat dijalankan secara maksimal dan efektif, dimana sebagian masyarakat merasa bahwa kepemimpinan yang bersangkutan belum dapat memenuhi harapan masyarakat desa, begitu pula selama kepemimpinan beliau masyarakat mempersepsikan bahwa belum ada kemajuan yang signifikan terhadap desa botubilotahu, padahal wilayah desa botubilotahu berada dekat dengan jantung ibu kota pohuwato, memiliki akses

yang sangat dekat dengan pasar tradisional, pasar modern indomart, sekolah-sekolah, Rumah Sakit Umum Bumi Panua, namun dari pengamatan peneliti juga dimana desa botubilotahu terkesan stagnan dan jalan di tempt, belum mampu menunjukan geliat ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat. Masih terdapat masyarakat miskin, pengangguran dan serabutan. Sehingga desa tersebut belum dapat dikatakan maju dibandingankan dengan desa-desa tentangga dari botubilotahu.

Berdasarkan hasil penelitian dari tanggapan dan persepsi masyarakat tentang kinerja kepala desa botubilotahu yang disajikan melalui tabel frekuensi tersebut diatas yang dikorelasikan dengan temuan peneliti dilapangan, berkaitan dengan indikator pelaksanaan tugas kepala desa, maka secara keseluruhan indikator ini mendapatkan persepsi KURANG BAIK dari responden, dimana hasil penelitian menunjukan bahwa kepala desa botubilotahu sangat memahami tugas-tugas sebagai kepala desa, dimana tugas tersebut menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan dalam lingkup Desa dan memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa memiliki berbagai peran dan tugas yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya menurut rambu-rambu yang telah diatur secara normative, antara lain tugas sebagai pelaksana pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun berkaitan dengan kemampuan kepala desa botubilotahu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa sebagian responden mempersepsikan bahwa kepala desa dinilai kurang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu

contoh permasalahan yang dianggap tidak mampu diselesaikan oleh kepala desa adalah adanya permasalahan internal kepala desa dengan aparatur desa yang terjadi tahun kemarin dan berdampak pada pergantian aparatur desa tersebut sehingga menimbulkan permasalahan baru. Bahkan dari temuan peneliti dimana hubungan antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (Desa) sampai saat ini tidak harmonis yang dalam cermatan peneliti ketidak harmonisan tersebut terjadi karena dalang utama penonaktifan sementara kepala desa botubilotahu karena rekomendasi BPD itu sendiri. Hal ini yang membuktikan menurut sebagian responden mempersepsikan gambaran ketidakmampuan kepala desa dalam menyelesaikan setiap permasalahan desa. Selain itu pula hasil penelitian juga menunjukan bahwa kepala desa botubilotahu dianggap masih kurang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, banyak permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat yang tidak mendapatkan solusi terbaik dari kepala desa, salah satu contohnya adalah berkaitan dengan keluhan masyarakat atas ketidakadilan dan ketidak merataan penerima bantuan dari pemerintah desa, banyak bantuan-bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan permasalahan diantara masyarakat yang sampai saat ini belum mendapatkan solusi terbaik.

Berdasarkan hasil penelitian dari tanggapan dan persepsi masyarakat tentang kinerja kepala desa botubilotahu yang disajikan melalui tabel frekuensi tersebut diatas yang dikorelasikan dengan temuan peneliti dilapangan, berkaitan dengan indikator tanggung jawab kepala desa, maka secara keseluruhan menunjukan bahwa tanggung jawab kepala desa botubilotahu mendapatkan persepsi yang BAIK

dari responden dan masyarakat. Hal ini di buktikan dimana kepala desa botubilotahu dianggap bertanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinannya, karena tanggung jawab kepala desa sebagai pemimpin bukan hanya sekedar menyelenggarakan pemerintahan desa, namun lebih dari itu kepala desa harus mampu melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat, karena selama kepemimpinan beliau yang sudah mendekati 2 (dua) periode kepala desa dianggap mampu menjalankan kepemimpinannya meskipun masih belum efektif dan masih terdapat banyak kekurangan, namun secara garis besar dapat dikatakan baik, begitu pula tanggung jawab kepala desa yang bersedia menanggung resiko apapun dalam setiap keputusannya, karan seorang pemimpin dituntut untuk berani mengambil keputusan terukur demi untuk kepentingan publik meskipun keputusan tersebut beresiko tinggi namun tetap dilandasi dengan pemikiran yang logis dan rasional, dan hal tersebut banyak di lakukan oleh kepala desa botubilotahu selama yang bersangkutan menjabat sampai dengan saat ini. Namun dibalik dari kemampuan kepala desa yang selalu bertanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinannya serta kemampuan yang selalu bertanggung jawab dan bersedia menerima resiko dalam setiap keputusan, dalam indikator ini kepala desa botubilotahu memiliki kelemahan dalam mengakui kesalahan secara terbuka dan memperbaikinya apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kepemimpinannya sebagai kepala desa, hal ini sesuai dengan temuan peneliti berdasarkan informasi yang dapat dari responden dimana kepala desa botubilotahu jarang sekali mengakui kesalahan dan kekeliruannya kepada masyarakat, apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang kinerja kepala desa botubilotahu yang di ukur melalui dimensi kualitas, dapat disimpulkan dari keempat pertanyaan dalam indikator tersebut rata-rata mendapatkan persepsi BAIK dari responden berdasarkan perhitungan skala interval jawaban responden.
2. Berdasarkan hasil penelitian dari tanggapan dan persepsi masyarakat tentang kinerja kepala desa botubilotahu yang disajikan melalui tabel frekuensi tersebut diatas yang dikorelasikan dengan temuan peneliti dilapangan, maka secara keseluruhan bahwa indikator kuantitas, dapat disimpulkan dari ketiga pertanyaan dalam indikator tersebut rata-rata mendapatkan persepsi KURANG BAIK dari responden berdasarkan perhitungan skala interval jawaban responden.
3. Berdasarkan hasil penelitian dari tanggapan dan persepsi masyarakat tentang kinerja kepala desa botubilotahu yang disajikan melalui tabel frekuensi tersebut diatas yang dikorelasikan dengan temuan peneliti dilapangan, berkaitan dengan indikator pelaksanaan tugas kepala desa, dapat disimpulkan dari ketiga pertanyaan dalam indikator tersebut rata-rata mendapatkan persepsi KURANG

BAIK dari responden berdasarkan perhitungan skala interval jawaban responden.

4. Berdasarkan hasil penelitian dari tanggapan dan persepsi masyarakat tentang kinerja kepala desa botubilotahu yang disajikan melalui tabel frekuensi tersebut diatas yang dikorelasikan dengan temuan peneliti dilapangan, berkaitan dengan indikator Tanggung Jawab, dapat disimpulkan dari ketiga pertanyaan dalam indikator tersebut rata-rata mendapatkan persepsi BAIK dari responden berdasarkan perhitungan skala interval jawaban responden.

4.4. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang bisa penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dampak dari penonaktifan sementara kepala desa botubilotahu yang terjadi tahun kemarin menyebabkan masyarakat terbagi dua antara pro dan kontra, sehingga diharapkan kepada kepala desa dan aparat desa botubilotahu, harus segera merajut kembali dan mempersatukan kembali masyarakat tersebut sehingga penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan efektif.
2. Terdapatnya beberapa permasalahan desa dan permasalahan masyarakat yang belum mendapatkan penanganan dan penyelesaian dari pemerintah desa, maka diharapkan kepala desa segera memberikan solusi konkret agar tidak akan berdampak pada perpecahan di tengah-tengah masyarakat.
3. Hendaknya kepala desa botubilotahu lebih terbuka dan ikhlas mengakui kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan kepemimpinannya, karena di

dapatkan dari hasil penelitian kepala desa jarang memperbaikinya apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan terutama dalam pengambilan keputusan.

4. Sebelum mengakhiri masa jabatan, hendaknya kepala desa lebih memfokuskan dan menggenjot program-program desa dan berusaha memajukan desa botubilotahu sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanif, Nurcholis. (2011). Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kaloh.(2003). Kepala daerah pola kegiatan kekuasaan, dan perilaku kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jakarta: PT.Gramedia pustaka utama.
- Mamesah, Dkk.(2002). Pemerintahan daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mangkunegara, A.P.(2009). Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. (1991). Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahmat, Djalaludin. (2009). Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Sani, Abdul. (2007). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayati. (2011). Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar M.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soejono. (2009). Dasar-dasar kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Ombak.
- Toha, Miftah.(2007). Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.
- Walgitto, Bimo. (2010). Psikologi Sosial (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widyatun.(2009). Psikologi Sosial. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widjaja.A.W.(2002). Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sumber Jurnal Jurnal

Paramitha, Dkk. Kinerja Aparat Pemerintah Dalam Rangka Otonomi Desa (Studi Pada Gulun, Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Jurnal Administrasi Publik. Vol 1, No4, Hal 91. 2019.

Sari, Dkk. Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Jurnal Pendidikan. Vol 3 No 5 Hal 12. 2018.

Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN

1. PetunjukUmum

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini, penulis mohon agar Bapak/Ibu/Sdr(i) membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian kuesioner dengan teliti. Harap mengisi dan menjawab pertanyaan dengan keyakinan yang tinggi tanpa keraguan sesuai dengan kejadian yang ada.

2. IdentitasResponden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk melengkapi daftar isian yang tertera dibawah ini:

1. Nama :
2. Tempat/Tgl.Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
5. Jenjang Pendidikan :

3. PetunjukPengisian

- Mohon dibaca setiap pernyataan dengan teliti.
- Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang ada selama Bapak/Ibu bekerja, kemudian berikan ceklis (✓) untuk salah satu jawaban, disertai dengan alasan yang tepat.
- Dalam mengisi kuesioner ini mohon dijawab semua pertanyaan yang ada, karena penulis membutuhkan jawaban untuk kepentingan penelitian.

DAFTAR PERTANYAAN

A. Indikator Kualitas

1. Menurut bapak/ibu apakah kepala desa botubilotahu memiliki kualitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa ?
 - a. Sangat Memiliki
 - b. Memiliki u
 - c. Kurang Memiliki
 - d. Tidak Memiliki
2. Menurut bapak/ibu apakah kepala desa botubilotahu pernah melakukan kesalahan dalam kepemimpinannya ?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Tidak Pernah
3. Menurut bapak/ibu apakah kepala desa botubilotahu sudah menjalankan kepemimpinannya dengan baik?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Kurang Baik
 - d. Tidak Baik
4. Menurut bapak/ibu apakah kepala desa botubilotahu dalam kepemimpinanya penuh perhitungan, cermat dan teliti?
 - a. Sangat Cermat dan Teliti
 - b. Cermat dan teliti
 - c. Kurang cermat dan teliti
 - d. Tidak cermat dan teliti

B. Indikator Kuantitas

5. Menurut bapak/ibu apakah kepala desa botubilotahu selama 2 (dua) periode kepemimpinanya telah membawa kemajuan desa?
 - a. Sangat Maju
 - b. Maju
 - c. Kurang Maju
 - d. Tidak Maju
6. Menurut bapak/ibu apakah pencapaian kinerja kepala desa botubilotahu selama 2 (dua) periode kepemimpinanya telah memenuhi harapan masyarakat ?
 - a. Sangat memenuhi
 - b. Memenuhi
 - c. Kurang memenuhi
 - d. Tidak memenuhi
7. Menurut bapak/ibu apakah kepala desa botubilotahu mampu menyelesaikan semua program desa ?
 - a. Sangat Mampu
 - b. Mampu
 - c. Kurang Mampu
 - d. Tidak memenuhi

C. Pelaksana Tugas

8. Menurut bapak/ibu apakah kepala desa botubilotahu memahami tugas-tugas kepala desa?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
9. Menurut bapak/ibu apakah kepala desa botubilotahu mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan desa?
 - a. Sangat Mampu
 - b. Mampu
 - c. Kurang Mampu
 - d. Tidak Mampu
10. Menurut bapak/ibu apakah kepala desa botubilotahu mampu setiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah

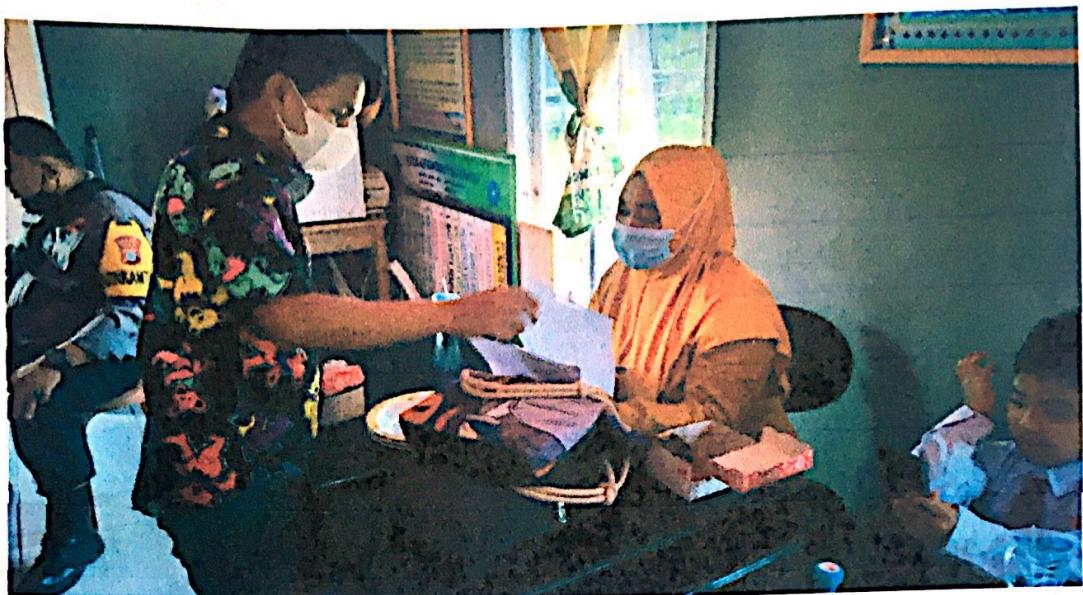
D. Indikator Tanggung Jawab

11. Menurut bapak/ibu apakah kepala desa botubilotahu memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinannya?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Jarang
12. Menurut bapak/ibu apakah kepala desa botubilotahu selalu memperbaikinya apabila melakukan kesalahan ?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. jarang
13. Menurut bapak/ibu apakah kepala desa botubilotahu bersedia mengambil resiko dalam setiap keputusan?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Jarang

TERIMA KASIH

DOKUMENTASI PENELITIAN







PEMERINTAH KABUPATEN POHuwATO
KECAMATAN MARISA
DESA BOTUBILOTAHU

Jln. Sultan Amai K.P 96266

SURAT KETERANGAN

No:145/DBB-MRS/ 205 N/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ONE MBUINGA**
Jabatan : Kepala Desa Botubilotahu
Alamat : Desa Botubilotahu Kec. Marisa Kab. Pohuwato

Dengan ini memberikan Keterangan yang benar kepada :

Nama : **FERDI HUSAIN**
T.T.L : Marisa, 07-08-1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Ilotabi Desa Botubilotahu Kec. Marisa
Kab. Pohuwato

Bahwa yang bersangkutan diatas benar-benar Telah melakukan penelitian di Desa Botubilotahu dengan Judul Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Kepala Desa Di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Marisa, 25 Mei 2022
KEPALA DESA BOTUBILOTAHU

ONE MBUINGA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
Nomor : 146/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
NIDN : 0924076701
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : FERDI HUSAIN
NIM : S2118149
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Kepala Desa Di Desa Botubilotahu

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 20%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 06 Juni 2022
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Dekan,

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602

Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
NIDN. 0924076701

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

Skripsi_S2118149_Ferdi Husain_Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Kepala Desa di Desa Botubilotahu

AUTHOR

S2118149 FERDI HUSAIN

WORD COUNT

13733 Words

CHARACTER COUNT

89997 Characters

PAGE COUNT

80 Pages

FILE SIZE

190.9KB

SUBMISSION DATE

Jun 11, 2022 11:02 AM GMT+8

REPORT DATE

Jun 11, 2022 11:04 AM GMT+8

● 20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 20% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database

- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material

- Small Matches (Less than 25 words)

● 20% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 20% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	marisaselatan.desa.id	5%
	Internet	
2	123dok.com	4%
	Internet	
3	repository.unhas.ac.id	3%
	Internet	
4	docstoc.com	1%
	Internet	
5	repository.stieipwija.ac.id	<1%
	Internet	
6	djangka.com	<1%
	Internet	
7	jurnal.fkip.unila.ac.id	<1%
	Internet	
8	repository.stienobel-indonesia.ac.id	<1%
	Internet	

9	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
	Internet	
10	ojs.ukim.ac.id	<1%
	Internet	
11	repository.usu.ac.id	<1%
	Internet	
12	jurnal.pancabudi.ac.id	<1%
	Internet	
13	uhp.ac.id	<1%
	Internet	
14	patoloan.com	<1%
	Internet	
15	anzdoc.com	<1%
	Internet	
16	e-jurnal.sari-mutiara.ac.id	<1%
	Internet	
17	adoc.pub	<1%
	Internet	
18	scribd.com	<1%
	Internet	
19	repository.uin-suska.ac.id	<1%
	Internet	
20	silvianoraadministrasipublik13.blogspot.com	<1%
	Internet	

Sources overview

21	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	
22	helukaanas.blogspot.com	<1%
	Internet	
23	repository.unpas.ac.id	<1%
	Internet	
24	fr.scribd.com	<1%
	Internet	

BIODATA MAHASISWA

Nama

: Ferdi Husain

NIM

: S2118149

Tempat Tanggal Lahir: Marisa, 07 Agustus 1999

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Alamat

: Dusun Ilotabi, Desa. Botubilotahu, Kec. Marisa

Data Orangtua

Nama Ayah

: Edi Husain

Pekerjaan

: Wiraswasta

Nama Ibu

: Foni Mbuinga

Pekerjaan

: URT

Alamat

: Desa Botubilotahu Kec. Marisa

Jenjang Pendidikan

SD

: Tamat Tahun 2011 di SDN 1 Botubilotahu

SLTP

: Tamat Tahun 2014 di SMP 2 Marisa

SLTA

: Tamat Tahun 2018 di MA Al-Mubarak

Masuk Universitas Ichsan Gorontalo Tahun Akademik : 2018/2019

Program : Sarjana

Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Tahun Akademik saat ini : 2022

Semester : 8 (Delapan)



Yang Menyatakan

(Ferdi Husain)